

**ANALISIS PENGARUH INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA, DANA  
BAGI HASIL, PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO, TINGKAT  
PENGANGGURAN TERBUKA DAN UPAH MINIMUM TERHADAP  
JUMLAH KEMISKINAN TINGKAT KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH  
PADA TAHUN 2017 - 2021**

**SKRIPSI**



Oleh:

Nama : Bayu Waskito Utomo  
Nomor Mahasiswa : 19313246  
Program Studi : Ekonomi Pembangunan

**FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2022**

**ANALISIS PENGARUH INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA, DANA  
BAGI HASIL, PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO, TINGKAT  
PENGANGGURAN TERBUKA DAN UPAH MINIMUM TERHADAP  
JUMLAH KEMISKINAN TINGKAT KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH  
PADA TAHUN 2017 - 2021**

**SKRIPSI**

Disusun dan diajukan untuk memenuhi syarat ujian akhir guna memperoleh gelar

Sarjana jenjang Strata 1

Program Studi Ekonomi Pembangunan,  
pada Fakultas Bisnis dan Ekonomika

Universitas Islam Indonesia

Oleh:

Nama : Bayu Waskito Utomo  
Nomor Mahasiswa : 19313246  
Program Studi : Ekonomi Pembangunan

**FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2022**

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang dapat dikategorikan dalam tindakan plagiasi seperti yang dimaksud dalam buku pedoman penulisan skripsi Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi sesuai dengan peraturan yang ditentukan dan berlaku.

Yogyakarta,

Penulis,



Bayu Waskito Utomo

## PENGESAHAN

Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia(IPM), Dana Bagi Hasil, Produk Domestik Regional Bruto(PDRB), Tingkat Pengangguran Terbuka dan Upah minimum terhadap Jumlah Kemiskinan Tingkat Kota di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2017 - 2021

Nama : Bayu Waskito Utomo  
Nomor Mahasiswa : 19313246  
Program Studi : Ekonomi Pembangunan

Yogyakarta,

Telah disetujui dan disahkan oleh

Dosen Pembimbing,



Dr. Unggul Priyandi M.Si.

1/12 2022  
alw  
nypan

## PENGESAHAN UJIAN

Telah dipertahankan/diuji dan disahkan untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar

Sarjana jenjang Strata 1 pada Fakultas Bisnis dan Ekonomika  
Universitas Islam Indonesia

Nama : Bayu Waskito Utomo  
Nomor Mahasiswa : 19313246  
Program Studi : Ekonomi Pembangunan

Yogyakarta, Januari 2022

Disahkan oleh,

Pembimbing Skripsi : Unggul Priyadi, Dr., Drs., M.Si.

Penguji :

Mengetahui

Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika  
Universitas Islam Indonesia

Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D., CFA, CertIPSAS.

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji dan syukur senantiasa kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, ridha dan karunia-Nya serta kemudahan dan kelancaran sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini peneliti persembahkan untuk:

1. Orangtua tersayang atas kasih sayang, perhatian, doa, semangat, dan segalanya berupa moril maupun materil yang tanpa henti diberikan untuk peneliti sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini.
2. Adikku Faradlila Agustina dan nenek yang selalu memberi semangat dan dukungan baik secara langsung dan tidak langsung setiap saat pada peneliti.
3. Teman-teman terdekat yang selalu memberikan masukan dan bantuan serta semangat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini.

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim.,*

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatub.*

Puji dan syukur senantiasa kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, ridha dan karunia-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Dana Bagi Hasil, Produk Domestik Regional Bruto, Tingkat Pengangguran Terbuka, Upah Minimum Terhadap Jumlah Kemiskinan Tingkat Kota di Provinsi Jawa Tengah 2017-2021”. Shalawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi Muhammad Saw. sebagai teladan bagi insan di muka bumi ini.

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi syarat guna mencapai gelar Sarjana 1 Ekonomi di Universitas Islam Indonesia. Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis menyadari adanya banyak pihak yang turut serta membantu dalam proses penyelesaian ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih atas doa, bantuan, dan bimbingan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada:

1. Orangtua tersayang untuk kasih sayang, perhatian, doa, semangat, baik berupa moril maupun materil yang tanpa henti diberikan untuk penulis sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini.
2. Adikku Faradlila Agustina dan nenek yang selalu memberi semangat dan dukungan baik secara langsung dan tidak langsung setiap saat pada peneliti.
3. Teman terdekat dan teman KKN yang selalu memberikan masukan dan bantuan serta semangat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D., CFrA, CertIPSAS. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.

6. Bapak Unggul Priyadi, Dr., Drs., M.Si. selaku dosen pembimbing skripsi yang banyak memberikan ilmu serta waktu dan tenaga untuk memberikan bimbingan serta saran yang sangat bermanfaat dalam penyusunan skripsi ini sehingga menjadi lebih baik lagi.
7. Bapak Drs. Agus Widarjono, MA., Ph.D. selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi
8. Bapak Dr. Sahabudin Sidiq, MA. selaku Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan Program Sarjana
9. Seluruh dosen dan karyawan Universitas Islam Indonesia, khususnya Fakultas Ekonomi yang telah banyak memberikan banyak pengetahuan, pengalaman dan ilmu yang sangat bermanfaat kepada penulis selama menempuh pendidikan.
10. Rekan-rekan seperjuangan skripsi dan rekan KKN yang menjadi tempat berbagi cerita dan ilmu dalam menyelesaikan perkuliahan.
11. Semua pihak terlibat yang tidak dapat peneliti sebutkan satu-persatu, yang telah banyak membantu dan memberikan masukan serta inspirasi bagi peneliti.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, dikarenakan masih adanya keterbatasan ilmu dan pengalaman yang dimiliki peneliti. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak sangat dibutuhkan untuk peneliti. Akhir kata saya ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatub*

Yogyakarta, 21 Juli 2022

Bayu Waskito Utomo



## DAFTAR ISI

COVER.....	
SKRIPSI .....	i
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
PENGESAHAN.....	iii
PENGESAHAN UJIAN.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI .....	viii
DAFTAR GAMBAR .....	xi
DAFTAR TABEL .....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
ABSTRAK .....	xiv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1    Latar Belakang Masalah .....	1
1.2    Rumusan Masalah.....	11
1.3    Tujuan dan Manfaat .....	12
1.3.1    Tujuan Penelitian.....	12
1.3.2    Manfaat Penelitian.....	12
1.4    Sistematika Penulisan.....	13
BAB II.....	15
LANDASAN TEORI .....	15
2.1    Kajian Pustaka.....	15
2.2    Landasan Teori .....	25
2.2.1    Kemiskinan (poverty) .....	25
2.2.2    Indeks Pembangunan Manusia (IPM).....	28
2.2.3    Dana Bagi Hasil (DBH) .....	29
2.2.4    Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).....	30

2.2.5	Tingkat Pengangguran Terbuka (IPT) .....	31
2.2.6	Upah Minimum .....	33
2.3	Hubungan Antar Variabel .....	35
2.3.1	Hubungan IPM terhadap Kemiskinan .....	35
2.3.2	Hubungan Dana Bagi Hasil terhadap Kemiskinan .....	35
2.3.3	Hubungan PDRB terhadap Kemiskinan .....	35
2.3.4	Hubungan Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Kemiskinan .....	35
2.3.5	Hubungan Upah Minimum terhadap Kemiskinan.....	36
2.4	Kerangka Pemikiran.....	36
2.5	Hipotesis .....	37
BAB III	.....	38
METODE PENELITIAN	.....	38
3.1	Jenis dan Pengumpulan Data.....	38
3.2	Definisi Operasional Variabel.....	38
3.3	Metode Analisis.....	39
3.4	Estimasi Model Regresi Data Panel.....	41
3.4.1	<i>Common effect model</i> (CEM).....	41
3.4.2	<i>Fixed effect model</i> (FEM) .....	41
3.4.3	<i>Random effect model</i> (REM) .....	41
3.4.4	Uji Hausman .....	42
3.4.5	Uji Chow.....	42
3.4.6	Uji LM ( <i>Lagrange Multiplier</i> ) .....	43
3.5	Uji Statistik.....	43
3.5.1	Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) .....	43
3.5.2	Koefisien Regresi Bersama (Uji F).....	43
3.5.3	Koefisien Regresi Parsial (Uji t) .....	44
BAB IV	.....	45
PEMBAHASAN	.....	45
4.1	Analisis Data.....	45

4.2	Analisis Regresi Data Panel.....	46
4.2.1	Hasil Uji <i>Fixed effect model</i> .....	46
4.2.2	Hasil Uji <i>Chow</i> .....	47
4.2.3	Hasil Uji <i>Hausman</i> .....	47
4.3	Uji Statistik.....	48
4.3.1	Koefisien Determinasi.....	48
4.3.2	Uji F.....	48
4.3.3	Uji t.....	49
4.4	Hasil dan Pembahasan.....	49
BAB V.....		54
SIMPULAN DAN IMPLIKASI .....		54
5.1	Simpulan .....	54
5.2	Implikasi.....	55
Daftar pustaka.....		57
LAMPIRAN.....		59

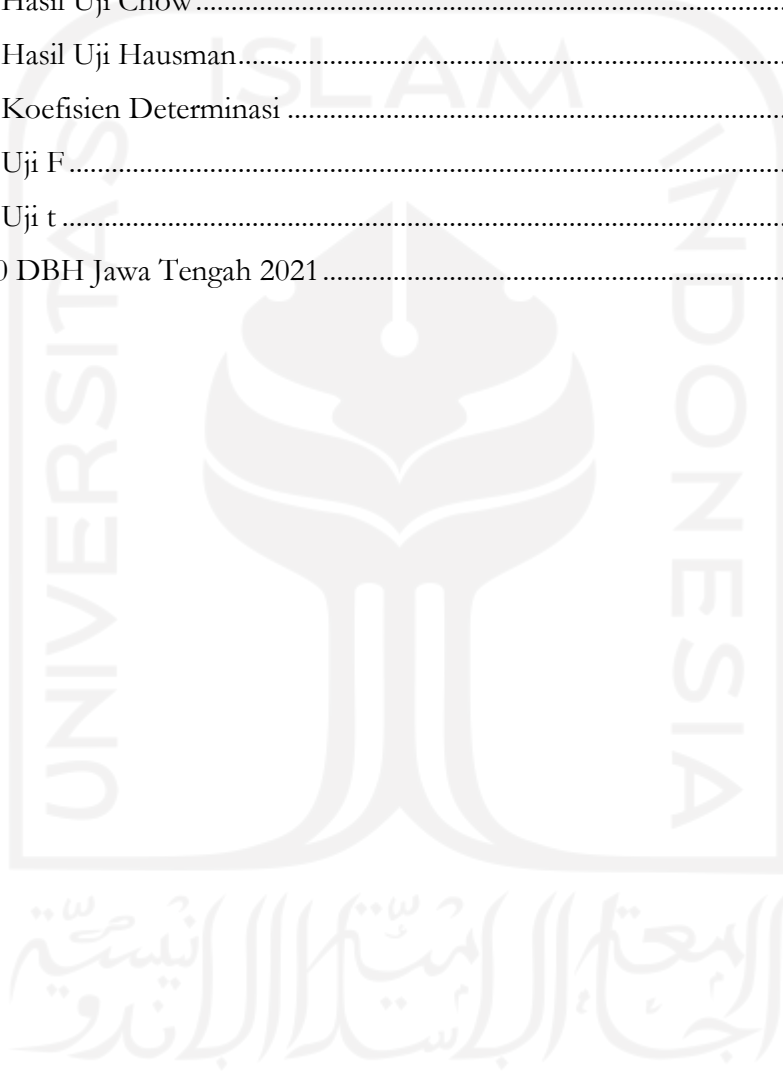


## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Indonesia Maret 2010-Maret 2021 .....	2
Gambar 1.2 Angka Kemiskinan Jawa Tengah .....	3
Gambar 1.3 Angka Indeks Pembangunan Manusia tingkat Kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2017-2021 .....	5
Gambar 1.4 Dana Bagi Hasil Tingkat Kota di Jawa Tengah tahun 2017-2021 .....	7
Gambar 1.5 Angka PDRB Tingkat Kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2017-2021 .....	8
Gambar 1.6 Angka Tingkat Pengangguran Terbuka Tingkat Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2017-2021 .....	9
Gambar 1.7 Upah Minimum Provinsi Tingkat Kota di Provinsi Jawa Tengah 2017-2021 .....	10
Gambar 2.1 Gambar Teori Lingkaran Setan Kemiskinan .....	27
Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran.....	36

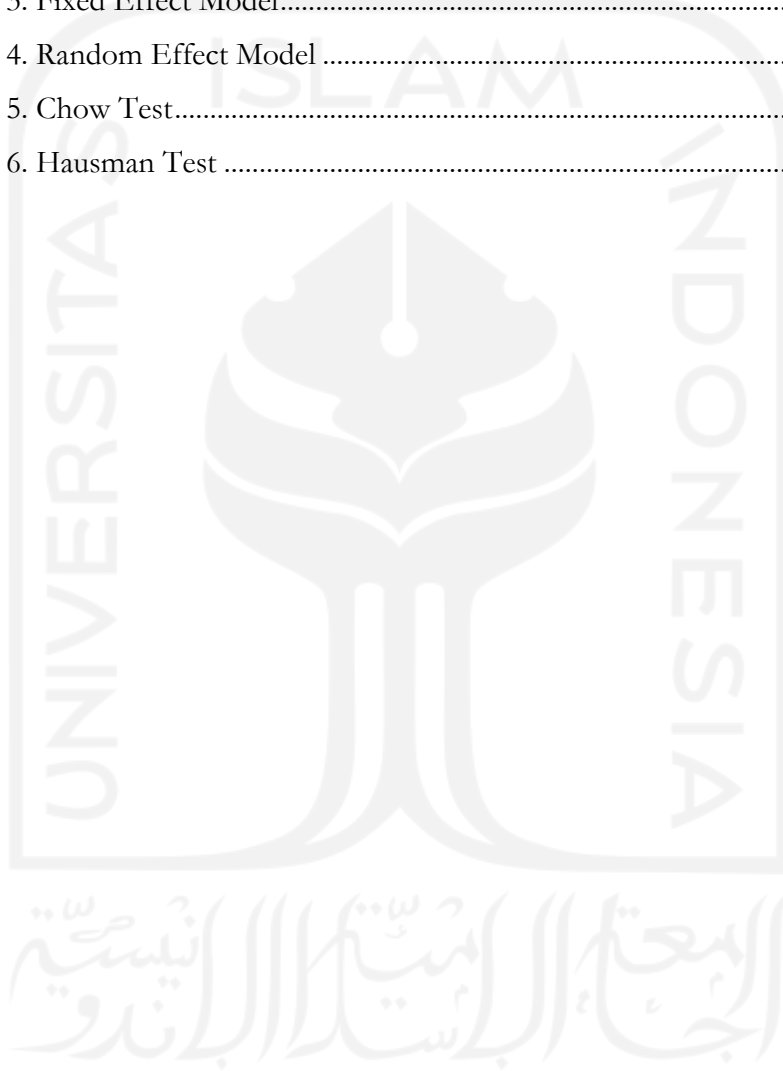
## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Kajian Pustaka Penelitian Terdahulu .....	19
Tabel 4.1 Statistik Deskriptif .....	45
Tabel 4.3 Hasil Uji FEM .....	46
Tabel 4.5 Hasil Uji Chow .....	47
Tabel 4.6 Hasil Uji Hausman .....	47
Tabel 4.7 Koefisien Determinasi .....	48
Tabel 4.8 Uji F .....	49
Tabel 4.9 Uji t .....	49
Tabel 4.10 DBH Jawa Tengah 2021 .....	51



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Data Penelitian .....	59
Lampiran 2. Common Effect Model.....	61
Lampiran 3. Fixed Effect Model.....	62
Lampiran 4. Random Effect Model .....	63
Lampiran 5. Chow Test.....	64
Lampiran 6. Hausman Test .....	65



## ABSTRAK

Kemiskinan dapat dijabarkan sebagai keadaan di mana masyarakat atau individu tidak dapat memenuhi kebutuhan standar kehidupan di suatu daerah tertentu. Keadaan ini dilihat dari seberapa besar kecilnya kesejahteraan yang diukur dari pemenuhan kebutuhan melalui pendapatan yang diperoleh. Pendapatan tadi dipengaruhi oleh banyak faktor seperti kualitas individu yang dapat dilihat melalui IPM, besaran nilai tambah dalam pertumbuhan ekonomi pada daerah tertentu dan periode tertentu melalui PDRB. Besaran tingkat pengangguran suatu daerah juga memberikan dampak persaingan yang ketat dalam memperebutkan lapangan pekerjaan, dengan hukum permintaan penawaran ini juga dapat mempengaruhi upah yang diterima walaupun besaran minimal telah ditentukan oleh pemerintah daerah. Tingginya angka PDRB, TPT dan UMK menjadi indikator bahwa proses pembangunan mengalami pertumbuhan dengan pemanfaatan dana transfer, salah satunya melalui DBH sebagai modal pemerintah daerah dalam proses pembangunan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh faktor IPM, DBH, PDRB, TPT, dan UMK terhadap jumlah kemiskinan pada tingkat kota di Provinsi Jawa Tengah dengan rentang tahun antara 2017-2021. Merupakan penelitian kuantitatif yakni dengan penggunaan data sekunder dari Badan Pusat Statistika dan kementerian keuangan tahun 2017-2021. Adapun jenis data yang digunakan adalah data panel dimana gabungan antara *cross section* (kota di Provinsi Jawa Tengah) dan *timeseries* (rentang tahun 2017-2021) sebagai instrumen penelitian serta digunakannya *E-Views* 10. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan dari variabel Dana Bagi Hasil. Pada variabel lain berpengaruh positif dan tidak signifikan yaitu variabel PDRB dan TPT. Sedangkan variabel Indeks Pembangunan Manusia dan Upah Minimum berpengaruh negatif dan signifikan. Ini menunjukkan bahwa variabel IPM, DBH, PDRB, TPT dan UMP memiliki pengaruh terhadap variabel Jumlah Kemiskinan di tingkat Kota Provinsi Jawa Tengah.

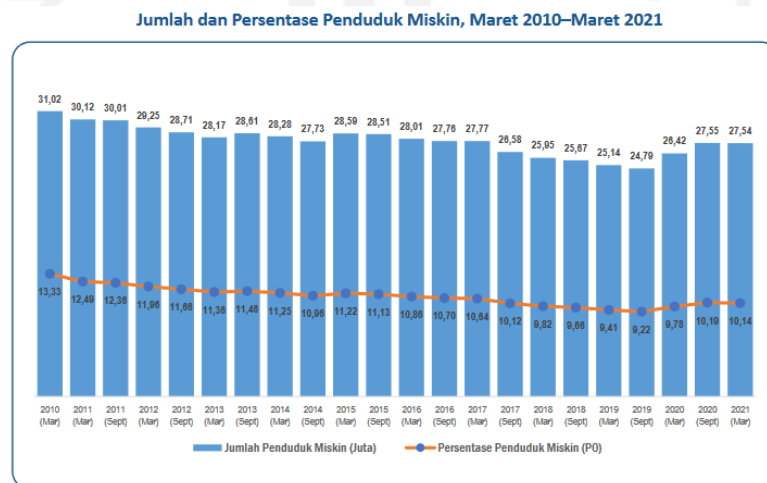
**Kata Kunci :** *IPM, DBH, PDRB, TPT, UMP dan Kemiskinan*

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan adalah bagian dasar dalam proses kesejahteraan masyarakat, selain mengenai struktur pada sosial, sikap masyarakat dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi tetapi juga menangani ketimpangan pendapatan serta pengentasan kemiskinan. Ekonomi pada era baru beranggapan bahwa pertumbuhan ekonomi bukan merupakan tujuan utama sebuah negara dalam mengukur pembangunan, akan tetapi perlu memperhatikan ketimpangan, baik dari segi ekonomi maupun sosial serta kemiskinan yang selama ini masih terjadi. Kemiskinan merupakan masalah sosial yang terus ada di kehidupan masyarakat, artinya selama di dunia terdapat masyarakat-masyarakat yang tinggal atau banyak pembangunan yang juga tidak terealisasikan, maka di dalamnya selalu dihantui dengan momok kemiskinan ini, serta merupakan masalah global yang terjadi pada setiap negara, akan tetapi setiap negara juga memiliki faktor dan dampak yang berbeda-beda, karena ukuran dari kemiskinan tiap negara juga berbeda satu sama lain serta perbedaan letak geografis maupun sumberdaya yang tersedia, baik sumber daya manusia yang berkualitas maupun sumber daya alam yang beragam.



Sumber: Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

Sumber : Badan Pusat Statistika

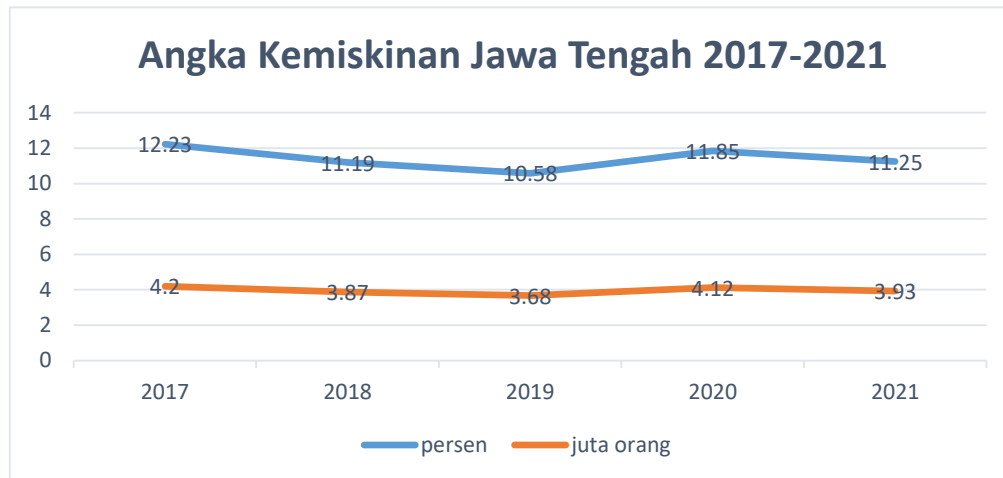


### **Gambar 1.1 Jumlah Persentase Penduduk Miskin Indonesia Maret 2010-Maret 2021**

Gambar 1.1. diatas menunjukkan secara umum menunjukkan penurunan tiap tahun, pada September 2013 dan Maret 2015 kemiskinan kembali mengalami sedikit kenaikan hal ini disebabkan karena naiknya harga bahan kebutuhan pokok akibat dampak harga minyak global yang naik saat itu. Dalam tahun berikutnya yaitu Maret 2020 dan September 2020, persentase penduduk miskin naik dari angka 24,79% naik menjadi 26,42% dan kembali naik di angka 27,55%. Kenaikan tersebut dipicu akibat dampak pandemi Covid-19 global yang melanda Indonesia dan juga ketidakstabilan ekonomi global yang mengakibatkan beberapa wilayah melakukan pembatasan di semua aspek baik ekonomi, sosial, budaya yang berimbas pada krisis global dan meningkatnya kemiskinan. Perekonomian Indonesia saat ini masih terus melebarkan sayapnya, pertumbuhan ekonomi kembali berlanjut dan menunjukkan peningkatan, begitu juga kemiskinan yang selalu berhubungan dengan pertumbuhan, kemiskinan pada September 2021 mengalami penurunan sebesar 0,01%. Harapannya penurunan ini terus berlanjut mengingat Indonesia mulai pulih pasca pandemi dan beberapa sektor pembangunan mulai kembali dilanjutkan.

Pulau Jawa sendiri memiliki tingkat kemiskinan yang cenderung tinggi, dalam september 2021 persentase penduduk miskin di pulau Jawa diduduki oleh Provinsi DI Yogyakarta dengan nilai sebesar 11,91% dan disusul oleh Provinsi Jawa Tengah dengan nilai sebesar 11,25% kemudian Provinsi Jawa Timur sebesar 10,59% Provinsi Jawa Barat sebesar 7,97% Provinsi Banten sebesar 6,5% dan DKI Jakarta sebesar 4,67%. Angka-angka tersebut mengalami penurunan jika dibandingkan pada bulan September 2020, dengan persentase penduduk miskin sebesar 10,19% dan total sebanyak 27,5 juta orang.

Provinsi Jawa Tengah, dengan kategori provinsi yang memiliki kemiskinan tinggi diperkirakan mengalami penurunan pada tahun berikutnya, tentunya penurunan ini merupakan hasil pemulihan nasional pasca pandemi yang cukup menaikkan angka kemiskinan secara drastis, ini juga didukung oleh pertumbuhan ekonomi.



Sumber : Badan Pusat Statistika Jawa Tengah 2021

**Gambar 1.2 Angka Kemiskinan Jawa Tengah**

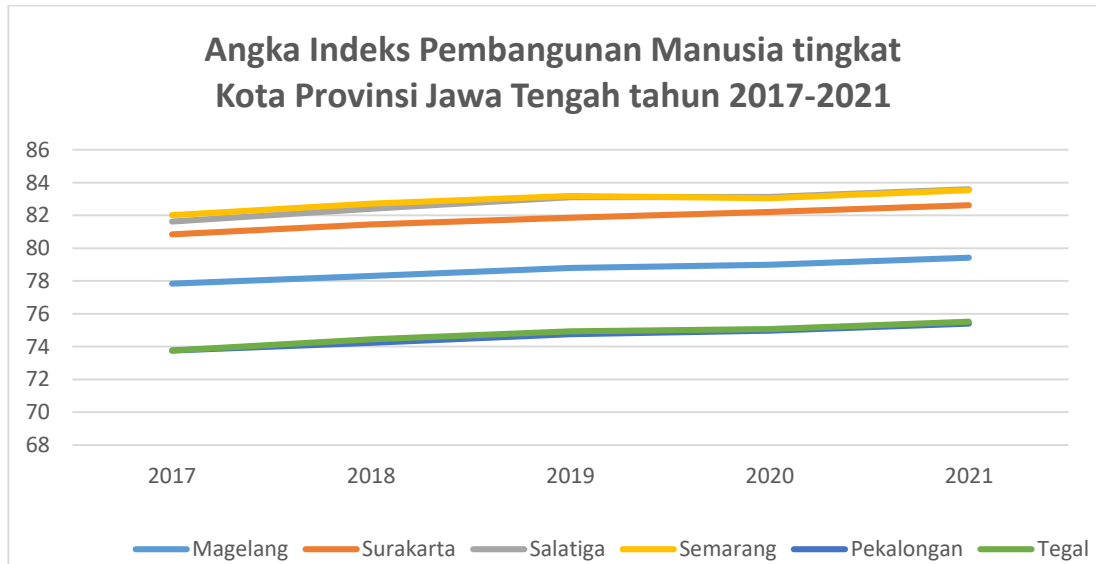
Gambar 1.2 menunjukkan kemiskinan pada Provinsi Jawa Tengah mengalami tren menurun, dari sebanyak 4,20 juta orang atau 12,23% pada tahun 2017 menjadi sebanyak 3,39 juta orang atau 11,25%, meskipun pada tahun 2020 mengalami kenaikan tentunya ini tidak bisa dihindarkan karena memang terjadi di seluruh dunia yakni pandemi covid-19. Namun, tren penurunan ini membuat dampak positif dimana pertumbuhan ekonomi kembali berjalan dan beberapa dampak positif lainnya.

Kemiskinan merupakan ketidakmampuan memenuhi kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, papan, dan obat-obatan (Prasetyoningrum & Sukmawati, 2018). Kemiskinan sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran (Badan Pusat Statistik, 2021). Dengan tingginya jumlah penduduk atau kebutuhan dasarnya yang tidak mampu dipenuhi, tentu akan menjadi “pekerjaan rumah” pemerintah dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Di sisi lain, banyaknya jumlah penduduk yang memiliki tingkat ekonomi dan produktivitas tinggi, akan mendorong kenaikan pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Dari sini, dapat disimpulkan bahwa kemiskinan adalah suatu keadaan dimana seseorang atau daerah tidak dapat meningkatkan kehidupan yang lebih layak atau

dapat dikatakan tidak dapat meningkatkan standar hidup yang lebih baik. Tentunya kemiskinan di Indonesia sendiri diukur berdasarkan banyaknya jumlah penduduk miskin dalam memenuhi kebutuhan dasarnya yakni sandang, pangan, dan papan yang konsepnya telah ditentukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Menurut (Sukirno, 2012) sebuah wilayah yang memiliki jumlah penduduk yang besar merupakan masalah mendasar di dalam pembangunan wilayah tersebut. Pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali akan berakibat pada tidak tercapainya tujuan pembangunan ekonomi yaitu kesejahteraan rakyat serta penekanan angka kemiskinan. Artinya jumlah penduduk bisa dapat faktor pendorong dan penghambat pembangunan. Sumber daya manusia sendiri merupakan tokoh penting di dalam kegiatan perekonomian. Pertama, mereka yang memegang peranan penting dalam segala aspek baik masyarakat maupun eksekutif dan legislatif, seperti dari segi kebijakan, yakni dengan mengatur segala kebijakan berkaitan dengan perekonomian dalam negeri maupun luar negeri dan dalam proses produksi hingga konsumsi. Dalam proses produksi, sumber daya manusia mencerminkan tingkat kualitas barang dan jasa yang akan dihasilkan. Pendistribusian barang, yakni mereka yang menyebarluaskan distribusi barang sehingga perekonomian dapat berjalan dan juga proses konsumsi, yang mana sumber daya manusia ini berperan untuk menukarkan uangnya dengan barang atau jasa yang dihasilkan.

Peranan dan fungsi tersebut dibagi dalam kategori mikro dan makro, dimana mikro mereka berperan sebagai bagian dari proses produksi dan makro mereka berperan sebagai bagian dari proses pembangunan. Sumber daya manusia atau dalam perkembangannya biasa disebut Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan dasar pondasi bagi keberlangsungan pertumbuhan ekonomi. Kegiatan perekonomian selalu mengandalkan potensi dari sumber daya manusia sebagai objek utamanya.



Sumber : Badan Pusat Statistik Jawa Tengah

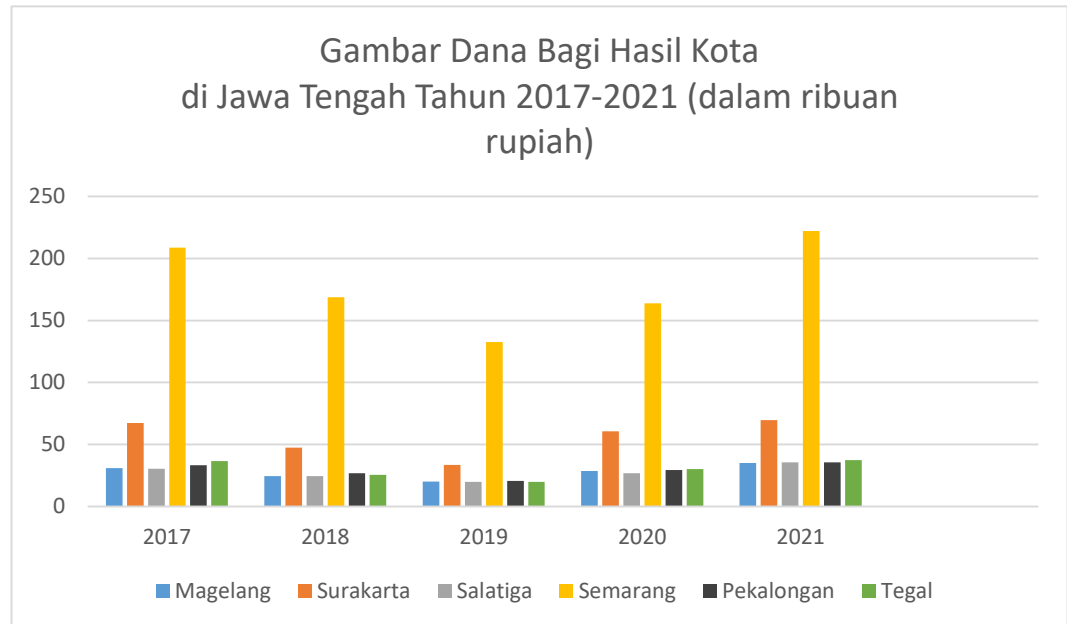
**Gambar 1.3 Angka Indeks Pembangunan Manusia tingkat Kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2017-2021**

Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia mengalami kenaikan secara signifikan, dari yang level sedang hingga level tinggi. Hal ini dapat dilihat pada gambar 1.3 jika pada enam kota di Jawa Tengah mengalami kenaikan walaupun terjadi gejolak sedikit pada tahun 2020. Pada tahun 2020 seluruh dunia sedang mengalami pandemi sehingga perekonomian tidak dalam kondisi yang stabil. Termasuk Indonesia yang saat ini mulai pulih pasca pandemi, mengalami kenaikan nilai pada berbagai sektor termasuk Indeks Pembangunan Manusia. Terkhusus enam kota di Jawa Tengah menjadi bagian penting dalam proses membangun sumber daya manusia, dimana terdapat kenaikan kembali pada tahun 2021.

Menurut Human Development Report (HDR) pertama tahun 1990, pembangunan sumber daya manusia merupakan proses dalam memperbanyak pilihan oleh manusia. Pilihan yang terpenting adalah tentang individual seperti, panjang umur dan sehat, memiliki ilmu pengetahuan, dan mempunyai akses sumber daya agar mempunyai hidup layak. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian dengan menggunakan sejumlah komponen dasar kualitas hidup (umur panjang dan sehat,

pengetahuan, dan kehidupan yang layak). Ketiganya memiliki pengertian yang luas karena terkait banyak faktor. Banyak cara dalam melakukan pengukuran, contoh dalam dimensi kesehatan, angka harapan hidup waktu lahir digunakan sebagai indikatornya. Dimensi pengetahuan, menggunakan kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak sebagai indikator.

Upaya pemerintah dalam menurunkan angka kemiskinan salah satunya adalah memberikan otonomi daerah pada Kabupaten/Kota yang diatur dalam UU No. 22 tahun 1999 tentang “Pemerintah Daerah” dan UU No. 25 tahun 1999 mengenai “Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah” serta UU No. 32 Tahun 2004 mengenai Pemerintah Daerah dimana bagian dari pembaharuan undang-undang sebelum tentang kewenangan Pemerintah Daerah untuk mengurus secara mandiri urusan pemerintahan sesuai asas otonomi. Dana perimbangan tadi berakibat kepada perubahan mekanisme pengelolaan pemerintah daerah, dana perimbangan tersebut terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH) serta bagian daerah sesuai dari bagi hasil oleh Pemerintah Pusat. DBH atau yang biasa disebut Dana Bagi Hasil merupakan dana pemerintahan pusat yang dibagi ke pemerintah daerah berdasarkan proporsi tertentu dan disalurkan berdasarkan oleh realisasi penerimaan negara pada tahun anggaran yang sedang berjalan dengan dana yang dibagikan bersumber dari dana APBN. Pola penerimaan anggaran ini dengan didasarkan kepada teori hipotesis Tiebout dimana tingginya penerimaan pajak suatu daerah dapat menentukan besarnya anggaran yang di transfer oleh pemerintah pusat.



Sumber : Badan Pusat Statistik Jawa Tengah

#### **Gambar 1.4 Dana Bagi Hasil Tingkat Kota di Jawa Tengah tahun 2017-2021**

Gambar 1.4 di atas menunjukkan bahwa Kota Semarang mendapatkan dana bagi hasil paling tinggi pada tingkat kota di Provinsi Jawa Tengah. Angka tertinggi diperoleh Kota Semarang pada angka 222.12 miliar pada tahun 2021. Apabila diamati hampir seluruh kota pada tahun 2021 mengalami kenaikan pada Kota Magelang tahun 2021 naik dari 28.52 miliar menjadi 35.03 miliar. Kota Surakarta pada tahun 2021 naik dari 60.58 miliar menjadi 69.57 miliar. Sedangkan Kota Salatiga tahun 2021 naik dari 26.81 miliar menjadi 35.44 miliar. Pada Kota Pekalongan di tahun 2021 naik dari angka 29.21 miliar menjadi 35.49 miliar. Dan terakhir Kota Tegal naik pada tahun 2021 dari 30.15 miliar menjadi 37.37 miliar.

Dana Bagi Hasil ini tentunya memiliki implikasi kepada kemiskinan namun tidak secara langsung, karena besarnya dana yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah tergantung pada penerimaan daerah tersebut, sehingga tiap-tiap daerah memiliki cara sendiri dalam memanfaatkan dana transfer tersebut. Namun, implikasi yang ada adalah dengan besarnya dana ke daerah akan terjadi pembangunan baik secara layanan

maupun pembangunan barang publik yang dapat mengurangi biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat.

Melalui otonomi daerah tersebut masyarakat akan terbantu dalam peningkatan perekonomian. Salah satu indikator dalam melihat perekonomian pada daerah dan periode tertentu yakni dengan melihat besaran angka PDRB. Angka PDRB didapat dari jumlah nilai tambah dari unit usaha pada daerah tertentu atau nilai barang dan jasa akhir dari output ekonomi di suatu daerah (*Badan Pusat Statistik, n.d.-a*).



Sumber : Badan Pusat Statistik Jawa Tengah

### Gambar 1.5 Angka PDRB Tingkat Kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2017-2021

Gambar 1.5 di atas memperlihatkan nilai PDRB dari tahun ke tahun cenderung stabil dan naik. Tahun 2021 Kota Semarang memiliki jumlah PDRB yang tinggi, yakni Rp. 123.279.891,91 juta. Disusul oleh Kota Surakarta yang memiliki PDRB, sebesar Rp. 36.211.248,26 juta. Kota Tegal memiliki PDRB, sebesar Rp. 11.290.268,87 juta serta Kota Salatiga dan Pekalongan masing-masing Rp. 9.820.286,85 dan Rp. 7.601.486,23. Kenaikan PDRB pada tiap tahunnya menandai bahwa tingkat pertumbuhan naik diikuti dengan tingkat pembangunan infrastruktur yang baik. Pembangunan infrastruktur tentunya akan menyerap tenaga kerja yang besar di setiap sektornya.



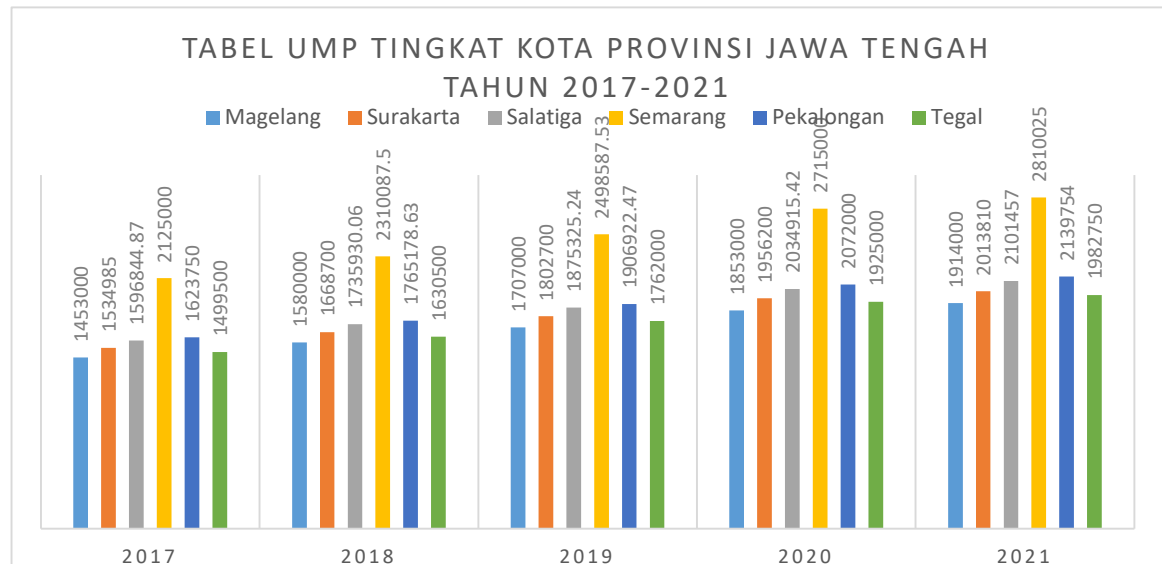
Sumber : Badan Pusat Statistik Jawa Tengah

**Gambar 1.6 Angka Tingkat Pengangguran Terbuka Tingkat Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2017-2021**

Gambar 1.6 menunjukkan bahwa kenaikan signifikan pengangguran pada tahun 2020, ini merupakan dampak dari pandemi covid-19 yang mana terjadi pada Indonesia, termasuk Provinsi Jawa Tengah. Kenaikan tadi berangsur turun pada tahun berikutnya. Tingkat pengangguran yang terus meningkat secara umum disebabkan oleh adanya ketidakseimbangan antara jumlah kesempatan kerja dan jumlah angkatan kerja yang tersedia. Masalah ini akan menyebabkan masalah-masalah lain muncul, seperti naiknya tingkat kriminalitas, menurunnya daya beli masyarakat serta tentunya akan membuat kestabilan politik menjadi terganggu.

Menurut (van/indrawiguna, 2013) Tingkat pertumbuhan angkatan kerja yang cepat dan pertumbuhan lapangan kerja yang relatif lambat menyebabkan masalah pengangguran yang ada di negara yang sedang berkembang. Tingginya tingkat pengangguran, luasnya kemiskinan, dan distribusi pendapatan yang tidak merata memiliki hubungan yang saling berkaitan. Artinya kemiskinan merupakan masalah multidimensi yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh berbagai macam indikator.





Sumber : Badan Pusat Statistik Jawa Tengah

**Gambar 1.7 Upah Minimum Provinsi Tingkat Kota di Provinsi Jawa Tengah  
2017-2021**

Berdasarkan pada data gambar 1.7 diatas, menunjukkan bahwa upah minimum di Provinsi Jawa Tengah cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dalam lima tahun kebelakang. Upah minimum setiap tahun mengalami kenaikan dengan jumlah yang bervariasi, sesuai dengan jumlah target pada tahun yang telah ditentukan. Kenaikan upah tentunya akan meningkatkan daya beli masyarakat, dan meningkatkan konsumsi domestik. Kenaikan upah minimum juga diikuti oleh kenaikan harga kebutuhan dasar. Kenaikan pada harga kebutuhan dasar memiliki implikasi terhadap kinerja perekonomian, dimana harga produksi akan meningkat dan upah pegawai yang naik. Secara tidak langsung kenaikan upah pegawai akan menjadi ganjalan apabila perusahaan atau produsen tidak mampu memenuhi laba akibatnya mereka akan mempekerjakan lebih sedikit karyawan dengan melakukan Pemutusan Hubungan kerja atau PHK. Solusi ini dinilai lebih efektif jika dibandingkan menambah jumlah produksi, karena dengan menambah jumlah produksi juga akan menambah tempat penyimpanan, jam kerja karyawan, alat produksi dll. Tentunya keuntungan yang didapatkan pelaku usaha akan berkurang dalam jangka pendek.

Fenomena tersebut akan berakibat terhadap naiknya jumlah angka pengangguran, dan ini menjadi dampak negatif dari kenaikan Produk Domestik Regional Bruto.

Kondisi ini tentunya mengundang para ekonom untuk melakukan analisa, menurut (Wahyudi & Rejekingsih, 2013) mengungkapkan bahwa kesehatan, pendidikan, pengeluaran pemerintahan dan investasi, pengangguran memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemiskinan di Jawa Tengah. Akan tetapi, pertumbuhan ekonomi tidak signifikan terhadap kemiskinan. Nadia Islami (2019) menunjukkan upah minimum provinsi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia. Dengan adanya berbagai hasil dan beragam kesimpulan maka diperlukan adanya analisa untuk dikaji ulang, dan dengan ini penulis menggunakan judul **“Analisis pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Dana Bagi Hasil (DBH), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Tingkat Pengangguran Terbuka, Upah Minimum terhadap kemiskinan di tingkat Kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2017-2021”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Penelitian ini merupakan bagian dari proposal yang mengulas mengenai pengaruh Indeks Pembangunan Manusia/IPM, Dana Bagi Hasil, Produk Domestik Regional Bruto/PDRB, Tingkat Pengangguran Terbuka, Upah Minimum terhadap kemiskinan pada tingkat Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2017-2021. Berikut adalah rumusan masalah dalam penelitian:

1. Bagaimana pengaruh secara simultan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Dana Bagi Hasil (DBH), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Tingkat pengangguran terbuka, dan Upah Minimum terhadap kemiskinan di tingkat Kota Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2017-2021?
2. Bagaimana pengaruh secara parsial Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap kemiskinan di tingkat Kota Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2017-2021?
3. Bagaimana pengaruh secara parsial Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap kemiskinan di tingkat Kota Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2017-2021?
4. Bagaimana pengaruh secara parsial Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap kemiskinan di tingkat Kota Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2017-2021?

5. Bagaimana pengaruh secara parsial Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap kemiskinan di tingkat Kota Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2017-2021?
6. Bagaimana pengaruh secara parsial Upah Minimum terhadap kemiskinan di tingkat Kota Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2017-2021?

### **1.3 Tujuan dan Manfaat**

#### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis pengaruh secara simultan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Dana Bagi Hasil (DBH), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Tingkat pengangguran terbuka, dan Upah Minimum terhadap kemiskinan di tingkat Kota Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2017-2021.
2. Menganalisis pengaruh secara parsial Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap kemiskinan di tingkat Kota Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2017-2021.
3. Menganalisis pengaruh secara parsial Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap kemiskinan di tingkat Kota Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2017-2021.
4. Menganalisis pengaruh secara parsial Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap kemiskinan di tingkat Kota Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2017-2021.
5. Menganalisis pengaruh secara parsial Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap kemiskinan di tingkat Kota Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2017-2021.
6. Menganalisis pengaruh secara parsial Upah Minimum terhadap kemiskinan di tingkat Kota Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2017-2021.

#### **1.3.2 Manfaat Penelitian**

1. Bagi Provinsi Jawa Tengah khususnya kota yang menjadi media penelitian yakni Kota Semarang, Kota Salatiga dan Kota Surakarta untuk melihat bagaimana cara memecahkan yang terjadi dengan melihat angka kemiskinan yang ada agar nantinya dapat mengambil keputusan mengenai kebijakan yang akan diambil untuk mengatasi kemiskinan di Jawa Tengah.
2. Bagi masyarakat umum, penelitian ini dapat menjadikan referensi maupun sebagai bahan dasar dalam melakukan kegiatan perekonomian.

3. Bagi peneliti lain, penelitian ini dapat menjadi acuan referensi atau menelaah hasil penelitian sebagai bahan analisis.
4. Bagi penulis sendiri, penelitian ini merupakan penerapan dalam pembelajaran ilmu ekonomi yang telah ditempuh dan di peroleh di dalam perkuliahan maupun praktek di masyarakat.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Pada penelitian ini terdapat sistematika penulisan yang disusun dan dikategorikan dalam lima bab. Untuk memudahkan dalam penyusunannya, peneliti akan memberikan gambaran dari keseluruhan penelitian yang dilakukan. Adapun penjelasannya sebagai berikut :

##### **BAB I Pendahuluan**

Pada bab satu, berisikan penjelasan mengenai masalah yang melatarbelakangi mengapa dilakukannya penelitian, disajikan beberapa data di dalamnya sebagai acuan, berikutnya berisikan rumusan masalah, tujuan dan manfaat dari penelitian ini serta sistematika penulisan.

##### **BAB II Kajian Pustaka dan Landasan Teori**

Bab ini menjelaskan penelitian-penelitian terdahulu yang merujuk pada variabel independen maupun variabel dependen pada penelitian yakni menjelaskan mengenai kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Dana Bagi Hasil (DBH), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Tingkat pengangguran terbuka, dan Upah Minimum. Memberikan gambaran melalui kerangka pemikiran dalam bentuk bagan.

##### **BAB III Metodologi Penelitian**

Bab ini berisikan metode yang digunakan oleh peneliti, didalamnya memuat waktu penelitian, tempat penelitian, jenis penelitian, populasi, sampel, teknik pengambilan data, sumber data penelitian, alat analisis dan metode analisis yang digunakan, estimasi model regresi data panel, serta uji statistik.

##### **BAB IV Hasil Analisis dan Pembahasan**

Bab ini berisikan data-data penelitian serta sajian hasil analisis data tersebut yang disertai dengan uraian hasil atau output yang diperoleh selama analisa dengan disajikan

secara ringkas dan jelas. Dijelaskan dalam 2 tahapan yakni deskripsi data penelitian dilanjutkan dengan hasil analisa dan uraiannya.

#### BAB V Simpulan dan Implikasi

Bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan dari penelitian dengan menyertakan jawaban pada rumusan masalah. Yang dibagi dalam kesimpulan serta saran yang dapat membantu dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan pemecahan masalah di kehidupan nyata yang tentunya berkaitan dengan topik penelitian.



## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 2.1 Kajian Pustaka

Kajian pustaka menjelaskan mengenai penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan dengan variabel dan permasalahan yang hampir sama sebagai acuan untuk melaksanakan penelitian, sehingga dapat dijadikan sebagai bahan referensi. Didalamnya memuat informasi-informasi penting serta beberapa kesamaan atau perbedaan yang menjadi bahan acuan. Penelitian sebelumnya akan dijabarkan sebagai berikut:

Wahyudi & Rejekingsih (2013) tentang “Analisis Kemiskinan di Jawa Tengah” yang dilakukan pada tahun 2013, mengungkapkan Jawa Tengah merupakan provinsi dengan persentase tingkat kemiskinan tertinggi di Jawa dalam beberapa tahun terakhir. Rata-rata persisten angka kemiskinan absolut lebih tinggi di Jawa Tengah pada level 20,02% yang termasuk dalam kategori Hard Core Poverty ( $>10\%$ ). Kemudian hampir 50% kabupaten/kota di Jawa Tengah masih memiliki angka kemiskinan absolut  $> 20\%$ . Penelitian ini bertujuan menganalisis kemiskinan dan mengetahui variabel apa saja yang mempengaruhi angka kemiskinan di Jawa Tengah. Dengan menggunakan metode analisis regresi data panel dengan model fixed effect. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesehatan, pendidikan, pengeluaran pemerintahan dan investasi, pengangguran berpengaruh signifikan terhadap angka kemiskinan di Jawa Tengah. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi belum signifikan terhadap angka kemiskinan.

Permana & Arianti (2012) mengenai “Analisis Pengaruh PDRB, Pengangguran, Pendidikan, Dan Kesehatan Terhadap Kemiskinan Di Jawa Tengah Tahun 2004-2009” dengan melihat tingginya tingkat kemiskinan di Jawa Tengah merupakan indikator bahwa pembangunan ekonomi yang belum berhasil. Oleh karenanya tujuan dari penelitiannya yakni menganalisis faktor yang mempengaruhi kemiskinan di 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah selama periode 2004-2009. Jenis data ini menggunakan data sekunder yaitu data panel, yang terdiri dari data time series selama periode 2004-2009 dan cross section 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah.

Dengan pendekatan model regresi data panel yakni model fixed effect. Hasil penelitian menunjukkan dimana tingkat pertumbuhan PDRB, pendidikan, kesehatan berpengaruh signifikan dan negatif terhadap kemiskinan. Sedangkan variabel tingkat pengangguran berpengaruh signifikan dan positif terhadap kemiskinan.

Setya Ningrum (2017) melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka, Indeks Pembangunan Manusia, Dan Upah Minimum Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Indonesia Tahun 2011-2015”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis Tingkat Pengangguran Terbuka, Indeks Pembangunan Manusia, dan Upah Minimum Penduduk Miskin di Indonesia Tahun 2011-2015. Menggunakan alat analisis data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistika Indonesia dan juga sumber jurnal lain. Hasil regresi menunjukkan bahwa nilai R-Square adalah 0,993546 yang berarti 99,35 persen variasi penduduk miskin (Y) bisa dijelaskan oleh variabel bebas dalam model statistik yaitu TPT, IPM, dan upah minimum. Sedangkan 0,65 persen variasi jumlah penduduk miskin (Y) dijelaskan oleh faktor-faktor di luar model.

A. Widodo, W. Waridin, J. Kodoatie (2012) dalam penelitiannya mengenai “Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Di Sektor Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Pengentasan Kemiskinan Melalui Peningkatan Pembangunan Manusia Di Provinsi Jawa Tengah”. penelitian ini bertujuan (a) untuk menggambarkan pola perkembangan tidak hanya belanja publik pada sektor pendidikan dan kesehatan, indikator pembangunan manusia, dan indikator kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah, (b) untuk mengidentifikasi dan menganalisis peran SDM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (a) secara umum pada tahun 2007 dan 2008, pola pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan dan kesehatan, IPM dan persentase jumlah penduduk miskin di kabupaten/kota menunjukkan tren positif. Artinya, terjadi peningkatan belanja pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan diikuti tidak hanya oleh peningkatan IPM. Namun, terjadi penurunan persentase penduduk yang miskin. (b) penelitian menunjukkan bahwa IPM lebih dominan menjadi variabel “moderator murni” daripada menjadi variabel intervening. (c) dapat disimpulkan bahwa hubungan

antara pengeluaran pemerintah untuk sektor pendidikan dan kesehatan dengan pengentasan kemiskinan diperkuat oleh peran IPM. Akibatnya, pengeluaran pemerintah untuk sektor pendidikan dan kesehatan tidak dengan sendirinya mempengaruhi pengurangan kemiskinan secara langsung.

Whisnu Adhi Saputra (2011) Melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, PDRB, IPM, Pengangguran terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten/Kota Jawa Tengah.” Penelitian tersebut pada jangka waktu tahun 2004-2008 Provinsi Jawa Tengah menempati peringkat pertama rata-rata tingkat kemiskinan dibandingkan pada 6 provinsi lainnya di pulau Jawa. Tujuan dari penelitian ini yakni menganalisa bagaimana dan seberapa besar pengaruh jumlah penduduk, PDRB, IPM dan pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Penelitian ini didukung dengan model analisis regresi linier berganda dengan data panel dan pendekatan *fixed effect*. Hasilnya menunjukkan jika variabel jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Tengah, sedangkan variabel PDRB, IPM, dan pengangguran berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Tengah.

Ari Kristin P & U. Sulia Sukmawati (2018) melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pertumbuhan Ekonomi dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Indonesia”. Tujuan dari penelitiannya adalah mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependent. Serta pengaruh tidak langsung IPM dan pertumbuhan ekonomi melalui pengangguran dalam mempengaruhi tingkat kemiskinan. Penelitian ini menggunakan data sekunder dari BPS dan penelitian ini bersifat kuantitatif dengan model data panel yakni data *time series* selama 2013-2017 dan data *cross section* dari 33 provinsi di Indonesia. Penelitian ini didukung oleh metode analisis jalur dengan hasil penelitian bahwa IPM berpengaruh secara langsung dan negatif terhadap tingkat kemiskinan, pada variabel pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penurunan tingkat kemiskinan sedangkan variabel pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Dapat disimpulkan bahwa variabel pengangguran dapat memediasi antara



Indeks Pembangunan Manusia dengan kemiskinan, dan juga dapat memediasi antara pertumbuhan ekonomi dengan kemiskinan.

(Pratomo, 2015) meneliti mengenai “pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana bagi hasil, dan belanja daerah terhadap kemiskinan di DKI Jakarta”. Hasil menunjukkan bahwa PAD tidak berpengaruh sig terhadap kemiskinan. Variabel lain yakni DBH, DAU, dan Belanja Daerah tidak berpengaruh sig terhadap kemiskinan. Besarnya angka koefisiensi menunjukkan besarnya pengaruh dari variabel bebas terhadap kemiskinan.

(Gumelar, 2021) meneliti mengenai “Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil terhadap tingkat kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2015-2019”. Hasil penelitian menunjukkan DAU, DAK, dan DBH berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan baik secara parsial maupun simultan.

Berikut disajikan beberapa penelitian sebelumnya dalam bentuk tabel. Memuat variabel-variabel yang dianggap berkaitan dengan jumlah kemiskinan :

**Tabel 1.1** Kajian Pustaka Penelitian Terdahulu

Judul & Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan & Perbedaan
<p>(Wahyudi &amp; Rejekingsih, 2013)</p> <p>Analisis Kemiskinan di Jawa Tengah tahun 2007-2010</p> <p><b>Metode :</b> Analisis regresi panel, model fixed effect</p> <p><b>Variabel Independen :</b> Pendidikan, Kesehatan, Pengeluaran Pemerintah, Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, Dummy</p> <p><b>Variabel Dependen :</b> Kemiskinan</p>	<p>Hasil dari penelitian memperlihatkan bahwa kesehatan, pendidikan, pemerintahan pengeluaran, pengangguran berpengaruh signifikan terhadap angka kemiskinan di Jawa Tengah. Namun, pertumbuhan ekonomi belum menunjukkan signifikannya terhadap kemiskinan. Peningkatan pengeluaran pemerintah secara umum berdampak pada penurunan kemiskinan.</p>	<p><b>Persamaan :</b> Memiliki persamaan dalam variabel dependen yakni kemiskinan, serta alat regresi menggunakan data panel</p> <p><b>Perbedaan :</b> Penelitian yang penulis lakukan terletak pada variabel independen serta objek dan tahun penelitian.</p>

<p>(Permana &amp; Arianti, 2012)</p> <p>Analisis Pengaruh PDRB, Pengangguran, Pendidikan, Dan Kesehatan Terhadap Kemiskinan Di Jawa Tengah Tahun 2004-2009</p> <p><b>Metode :</b> Analisis regresi panel, model fixed effect</p> <p><b>Variabel Independen :</b> PDRB, Pengangguran, Pendidikan, Kesehatan, Dummy</p> <p><b>Variabel Dependen :</b> Kemiskinan</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan dimana tingkat pertumbuhan PDB, pendidikan, kesehatan berpengaruh signifikan dan negatif terhadap kemiskinan. Sedangkan variabel tingkat pengangguran berpengaruh signifikan dan positif terhadap kemiskinan.</p>	<p><b>Persamaan :</b> Memiliki persamaan dalam variabel dependen yakni kemiskinan, serta regresi data panel. Pada beberapa variabel independen juga memiliki persamaan yakni pengangguran.</p> <p><b>Perbedaan :</b> Perbedaan yang mendasar yakni tahun yang digunakan dan variabel independen secara garis besar.</p>
<p>(Setya Ningrum, 2017)</p> <p>Analisis Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka, Indeks Pembangunan Manusia, Dan Upah Minimum Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Indonesia Tahun 2011-2015</p>	<p>Hasil regresi menunjukkan bahwa nilai R-Square adalah 0,993546 yang berarti 99,35 persen variasi penduduk miskin (Y) bisa dijelaskan oleh variabel bebas dalam model statistik yaitu TPT, IPM, dan upah minimum. Sedangkan 0,65 persen variasi</p>	<p><b>Persamaan :</b> Sama-sama menggunakan kemiskinan sebagai variabel dependen serta variabel independen seperti IPM, TPT, dan UMP</p> <p><b>Perbedaan :</b> Memiliki perbedaan pada tahun yang berlaku, dengan tahun yang digunakan</p>

<p><b>Metode :</b> Analisis Regresi data panel</p> <p><b>Variabel Independen :</b> Tingkat Pengangguran Terbuka, IPM, dan Upah Minimum</p> <p><b>Variabel Dependen :</b> Kemiskinan</p>	<p>jumlah penduduk miskin (Y) dijelaskan oleh faktor-faktor di luar model.</p>	<p>antara 2011-2015 sedangkan penulis menggunakan tahun 2017-2021.</p>
<p>(Kevin et al., 2020)</p> <p>Pengaruh Inflasi dan Laju Pertumbuhan Penduduk terhadap Kemiskinan di Sumatera bagian Selatan Tahun 2011-2018</p> <p><b>Metode :</b> Kuantitatif, Data Panel Random Effect</p> <p><b>Variabel Independen :</b> Inflasi dan Laju Pertumbuhan</p> <p><b>Variabel Dependen :</b> Kemiskinan</p>	<p>Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa secara simultan variabel independent yakni variabel inflasi dan variabel laju pertumbuhan penduduk berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Jika secara parsial variabel independent yakni variabel inflasi dan laju pertumbuhan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kemiskinan, namun variabel laju pertumbuhan penduduk berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan.</p>	<p><b>Persamaan :</b> Persamaan penelitian ini adalah variabel dependen, serta salah satu variabel independen yang digunakan yakni laju pertumbuhan penduduk. Data yang digunakan juga memiliki kesamaan yakni menggunakan kuantitatif data panel.</p> <p><b>Perbedaan :</b> Memiliki perbedaan pada variabel independen yakni inflasi serta objek penelitian yang digunakan serta tahun dasar.</p>

<p>(Prasetyoningrum &amp; Sukmawati, 2018)</p> <p>Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pertumbuhan Ekonomi dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Indonesia.</p> <p><b>Metode :</b> Kuantitatif, Analisis Regresi Logistik (<i>SPSS</i>)</p> <p><b>Variabel Independen :</b> Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pertumbuhan Ekonomi dan Pengangguran.</p> <p><b>Variabel Dependen :</b> Kemiskinan</p>	<p>Hasil dari penelitian IPM berpengaruh secara langsung dan negatif terhadap tingkat kemiskinan, pada variabel pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penurunan tingkat kemiskinan sedangkan variabel pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Dapat disimpulkan bahwa variabel pengangguran dapat memediasi antara Indeks Pembangunan Manusia dengan kemiskinan, dan juga dapat memediasi antara pertumbuhan ekonomi dengan kemiskinan.</p>	<p><b>Persamaan :</b></p> <p>Memiliki persamaan dalam variabel dependen yakni kemiskinan sedangkan variabel independen yaitu IPM dan pengangguran.</p> <p><b>Perbedaan :</b></p> <p>Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan ialah terletak pada objek lokasi penelitian dan alat regresi yakni spss.</p>
<p>(Berliani, 2021)</p> <p>Pengaruh Tingkat Pengangguran, Tingkat Pendidikan dan Laju Pertumbuhan Penduduk</p>	<p>Hasil dari penelitian ini baik secara parsial dan simultan tingkat pengangguran, tingkat pendidikan dan laju pertumbuhan penduduk berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan</p>	<p><b>Persamaan :</b> Memiliki persamaan pada variabel dependen, kemiskinan penduduk serta variabel independen, tingkat pengangguran terbuka dan laju pertumbuhan penduduk.</p>

<p>terhadap Tingkat Kemiskinan Penduduk Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2020</p> <p><b>Metode:</b> Deskriptif Kuantitatif, Analisis Regresi Berganda</p> <p><b>Variabel Independen:</b> Tingkat Pengangguran, Tingkat Pendidikan, dan Laju Pertumbuhan Penduduk</p> <p><b>Variabel Dependen :</b> Kemiskinan</p>	<p>penduduk Provinsi Jawa Barat pada tahun 2015-2020.</p>	<p><b>Perbedaan :</b> Perbedaan pada objek penelitian serta tahun penelitian yakni antara 2015-2020.</p>
<p>(Pratomo, 2015)</p> <p>Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil Dan Belanja Daerah Terhadap Tingkat Kemiskinan di DKI Jakarta</p> <p><b>Metode :</b> Deskriptif Kuantitatif, Analisis Regresi Berganda</p>	<p>Hasilnya menunjukkan bahwa PAD, DAU dan belanja daerah tidak berpengaruh yang signifikan dan variabel DBH berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan</p>	<p><b>Persamaan :</b> Menggunakan variabel Dana Bagi Hasil dan variabel dependen kemiskinan sama.</p> <p><b>Perbedaan :</b> Perbedaan disini ialah jenis data yang digunakan berbeda dimana penulis ini menggunakan data time series selama 12 tahun.</p>

**Variabel Independen :** Pendapatan Asli Daerah,  
Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil dan Belanja  
Daerah

**Variabel Dependen :** Kemiskinan



Dari hasil penelitian kajian pustaka terdahulu, menunjukkan beberapa variabel-variabel penting dan berpengaruh. Sehingga dapat disimpulkan apabila variabel indeks pembangunan manusia (IPM), pengangguran terbuka, pengeluaran pemerintah dan investasi, dan upah memiliki pengaruh penting terhadap kemiskinan dan penulis akan menggunakan variabel tersebut untuk melihat seberapa besar pengaruhnya terhadap Kota Semarang, Kota Salatiga dan juga Kota Surakarta pada tahun 2017-2021.

## **2.2 Landasan Teori**

### **2.2.1 Kemiskinan (poverty)**

#### **1. Konsep dasar kemiskinan**

Kemiskinan atau istilahnya *poverty* merupakan masalah yang harus dihadapi oleh seluruh negara, terutama di negara-negara berkembang dan tertinggal. Masalah kemiskinan tersebut bersifat multidimensional yaitu masalah yang disebabkan oleh banyak faktor yang tidak hanya menjadi domain bidang ekonomi saja, tetapi juga politik, sosial, budaya dan sistem sosial lainnya. Menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus, upaya penanggulangan kemiskinan tidak perlu terjebak pada faktor-faktor penyebab saja yang bisa jadi bersifat khusus atau kasus tertentu, namun didasarkan pada pemberdayaan dan pengembangan potensi sumberdaya yang tersedia (Diyah & Adawiyah, 2020).

Kemiskinan merupakan kondisi seseorang tidak dapat menikmati segala macam pilihan dan kesempatan dalam pemenuhan kebutuhan dasarnya baik kebutuhan konsumsi maupun kebutuhan tidak konsumsi. Kemiskinan merupakan masalah yang dihadapi oleh seluruh negara, terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Hal ini karena sifatnya multidimensional, artinya karena kebutuhan manusia itu bermacam-macam, maka kemiskinan pun banyak memiliki aspek primer yang berupa miskin akan aset, organisasi sosial politik, pengetahuan, dan keterampilan serta aspek sekunder yang berupa miskin akan jaringan sosial, sumber-sumber keuangan, dan informasi (van/indra wiguna, 2013).

#### **2. Ukuran kemiskinan**

Kemiskinan bukan lagi dinilai sebagai suatu dimensi ekonomi saja, melainkan juga semua dimensi, seperti pendidikan, kesehatan, sosial, dan juga politik.



Berdasarkan yang diungkapkan oleh Badan Pusat Statistika, ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Adapun penjelasan mengenai ukuran kemiskinan yang dibagi menjadi tiga aspek:

a. Kemiskinan Relatif

Kondisi ini terjadi karena adanya pengaruh kebijakan yang belum merata, akibatnya terjadi ketimpangan dalam distribusi pendapatan. Sehingga ukuran kemiskinan relatif ini bergantung kepada pendistribusian pendapatan maupun pengeluaran masyarakat sekitarnya. Ketika median/mean pendapatan meningkat, garis kemiskinan relatif juga meningkat. Dalam hal mengidentifikasi dan menentukan sasaran penduduk miskin, maka garis kemiskinan relatif cukup untuk digunakan, dan perlu disesuaikan terhadap tingkat pembangunan negara secara makro atau keseluruhan. Sehingga ukuran ini tidak dapat dijadikan patokan untuk membandingkan kemiskinan antar waktu maupun antar negara, karena akan terdapat perbedaan kesejahteraan didalamnya dan sifatnya yang dinamis.

b. Kemiskinan Absolut

Kemiskinan ini didasarkan pada ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar, dan istilah ini dapat diartikan dalam bentuk uang. Sehingga masyarakat dengan pendapatan rendah dapat dikategorikan sebagai masyarakat miskin. Konsep dan ukuran kemiskinan itu berbeda- beda di setiap daerah, contohnya kebutuhan masyarakat pedesaan berbeda dengan kebutuhan masyarakat perkotaan, dan begitu pula antara masyarakat desa pertanian dan desa nelayan.

c. Kemiskinan Kultural

Kemiskinan yang di kategorikan berdasarkan konsep ini yakni bila masyarakat tidak mempunyai usaha demi memperbaiki hidupnya. Oleh karena itu konsep kemiskinan ini dianggap berasal dari dalam diri karena kebiasaan ataupun sikap yang pemalas, tidak ingin berkembang untuk kehidupan yang lebih baik.

3. Indikator Pengukuran Kemiskinan

Merujuk pada unggahan BPS, disajikan sejumlah indikator yang dipergunakan dalam mengukur tingkat kemiskinan:

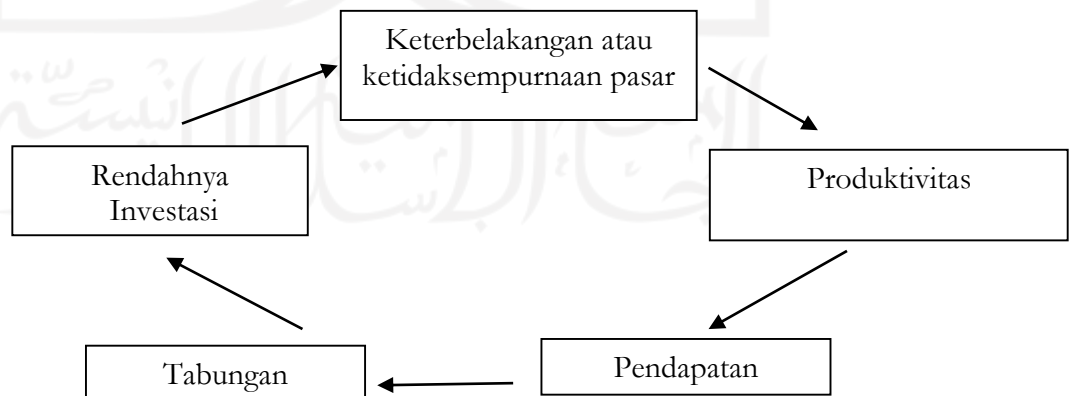
- a. Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index P1*), sebagai pengukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masyarakat pada garis kemiskinan. Nilai indeks yang tinggi diartikan bahwa pengeluaran rata-rata masyarakat jauh dari garis kemiskinan.
- b. Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index P2*), sebagai gambaran tentang sebaran pengeluaran antara masyarakat miskin. Nilai indeks yang tinggi diartikan bahwa ketimpangan juga tinggi.
- c. *Head Count Index*, yang dimaknai sebagai besaran persentase masyarakat dibawah garis kemiskinan.

#### 4. Penyebab Kemiskinan

Beberapa ahli ekonomi menyebutkan bahwa penyebab dari kemiskinan yang terus menghantui adalah adanya lingkaran setan kemiskinan. Banyaknya ketidaksempurnaan pasar, minimnya modal dan ketimpangan membuat produktivitas menjadi rendah. Produktivitas yang rendah juga berujung kepada pendapatan rendah dan kegiatan investasi serta menabung menjadi pasif.

Investasi yang rendah pada suatu daerah berakibat pada ketidakberkembangnya daerah tersebut dan terjadi keterbelakangan atau ketimpangan.

**Gambar 2.1** Gambar Teori Lingkaran Setan Kemiskinan



### **2.2.2 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**

Manusia sebagai pelaku utama dalam perekonomian tentu mempunyai andil yang sangat besar dalam kehidupan bermasyarakat. Kualitas sumber daya manusia juga dapat menjadi faktor penyebab terjadinya penduduk miskin. Kualitas sumber daya manusia dapat dilihat dari indeks kualitas hidup/ indeks pembangunan manusia. Rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) akan berakibat pada rendahnya produktivitas kerja dari penduduk. Produktivitas yang rendah berakibat pada rendahnya perolehan pendapatan. Sehingga dengan rendahnya pendapatan menyebabkan tingginya jumlah penduduk miskin (Saputra, 2018).

Indeks Pembangunan Manusia sendiri menggambarkan masyarakat dalam merasakan hasil pembangunan yakni dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan lainnya. Pentingnya angka IPM ini juga dapat dijadikan sebagai tolak ukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia baik pada sektor kesehatan, pendidikan maupun perekonomian. IPM juga dapat dijadikan sebagai penentu peringkat atau level pembangunan pada suatu wilayah.

Melihat pentingnya manfaat dan kegunaan dari angka IPM, maka demi menjaga keabsahan data dan kualitas perhitungan maka metode perhitungan IPM diubah sesuai dengan relevansi terbaru, adapun perubahannya sebagai berikut:

(a) Mengganti indikator yang tidak relevan

Indikator-indikator yang dinilai tidak tepat akan diganti, seperti indikator angka melek huruf dinilai sudah tidak relevan sebagai ukuran pendidikan secara keseluruhan tidak menggambarkan kualitas pendidikan yang ada. Selain itu, besaran angka melek huruf di sebagian besar daerah sudah tinggi, akibatnya kesulitan dalam membedakan tingkat pendidikan antar daerah dengan baik, sehingga angka melek huruf pada metode lama diganti dengan rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah karena lebih relevan dengan keadaan pendidikan sekarang dan perubahan yang terjadi. Selain angka melek huruf, indikator PDB per kapita juga dinilai sudah tidak relevan. PDB per kapita tidak dapat menjelaskan pendapatan

masyarakat pada suatu wilayah, akibatnya PDB per kapita diganti dengan PNB per kapita karena lebih menggambarkan pendapatan pada masyarakat di suatu daerah.

(b) Penggunaan rumus aritmatika

Dalam menghitung Indeks Pembangunan Manusia yakni pada rata-rata aritmatika, menggambarkan adanya subsidi silang pada suatu dimensi, yakni capaian pada suatu wilayah yang rendah ditutupi dengan capaian tinggi pada dimensi lain. Adapun rumus yang digunakan dalam perhitungan IPM dengan *mean* geometrik dari beberapa indeks (kesehatan, pengeluaran dan pendidikan) yakni :

$$IPM = \sqrt[3]{I_{kesehatan} \times I_{pendidikan} \times I_{pengeluaran}} \times 100$$

Menurut Rahmat & Bachtiar (2018) terdapat 3 hal dsar dalam pembangunan manusia:

- a. Harapan lama hidup, ini mengukur harapan hidup sejak lahir
- b. Pendidikan, diukur dengan mengkombinasikan jumlah orang yang melek huruf serta lama seseorang bersekolah
- c. Standar hidup yang layak, diukur dengan pengeluaran rata-rata penduduk yang telah ditentukan.

Banyak anggapan bahwa kemiskinan akan selalu beriringan dengan pembangunan lapangan pekerjaan yang minim. Namun, disisi lain investasi pada sektor pendidikan juga menjadi bagian penting untuk menjadi awal sebuah perubahan, terlebih dengan adanya potensi bonus demografi tentunya pendidikan yang baik juga akan menjadi pondasi dasar pengentasan kemiskinan.

### 2.2.3 Dana Bagi Hasil (DBH)

*Revenue* sharing merupakan dana APBN yang dialokasikan kepada pemda untuk mengurus kebutuhan rumah tangga daerah sendiri sesuai dengan aturan UU No. 25 tahun 1999 yang berlaku. Pembagian dana tersebut tidak serta merta rata ke seluruh daerah, tetapi dibagi berdasarkan prinsip menurut sumbernya, dalam artian penerimaan dana oleh pemerintah daerah dibagi menurut penerimaan daerah itu sendiri pada tahun berjalan. Revenue sharing terbagi berdasar sumbernya yakni DBH bersumber dari pajak dan bersumber dari sumber daya alam. DBH dari pajak terdiri atas Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

(BPHTB) serta Pajak Penghasilan (PPH) yang sudah diatur dalam peraturan Pasal 25 dan 29 serta PPh pasal 21.

Anggaran ini penting, baik dalam proses RAPBN maupun APBN sendiri karena DBH digunakan untuk membiayai pembangunan-pembangunan di daerah diluar PAD, DAU maupun DAK. Besaran dana pada tiap daerah berbeda-beda, tetapi memiliki ketentuan dimana 80 persen pendapatan untuk daerah dan 20 persen sisanya untuk pusat. Dana bersumber dari potensi-potensi yang ada pada setiap daerah, selain itu terdapat Iuran Hak Perusahaan dengan pembagian 64 persen untuk kabupaten/kota dan 16 persen untuk daerah terkait. Pendapatan dari sumber daya hutan dengan komposisi pembagian 32 persen untuk kab/kota dan 16 persen untuk daerah terkait. Pendapatan bersumber dana reboisasi dibagi dengan 40 persen untuk daerah dan 60 persen untuk pusat. Pendapatan dari pertambangan dengan komposisi 80 persen untuk daerah dan 20 persen untuk pusat, dengan penerimaan bersumber dari royalti dan iuran tetap (land-rent), dengan komposisi iuran royalti sebesar 32 persen untuk pemerintah daerah dan 16 persen untuk pemerintah pusat serta iuran tetap (land-rent) dikomposisikan 64 persen untuk kabupaten/kota daerah yang menghasilkan dan 16 persen untuk provinsi yang terkait. Pada sektor lain, yakni perikanan. Pendapatan dikomposisikan tidak hanya pada daerah tertentu akan tetapi 80 persen dibagi untuk kabupaten/kota di seluruh Indonesia

Iuran tetap yang dimaksud adalah jumlah dana yang diterima pemerintah pusat dari wilayah tambang sebagai penerimaan jasa penyelidikan umum, dalam konteks perizinan eksploitasi dan eksplorasi. Dan iuran eksplorasi merupakan dana yang diterima pemerintah pusat sebagai pihak yang berkuasa atas eksplorasi pertambangan tersebut.

#### **2.2.4 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)**

Pertumbuhan ekonomi secara riil yang tidak dipengaruhi oleh harga dapat diketahui melalui PDRB konstan ini. PDRB menurut harga konstan memperlihatkan nilai tambah pada suatu barang atau jasa dengan menggunakan dasar pada tahun tertentu sebagai tahun dasar. Sehingga PDRB dapat diartikan sebagai jumlah nilai tambah barang atau jasa yang dari hasil seluruh unit usaha pada tahun dan daerah tertentu (*Badan Pusat Statistik, n.d.-b*).

Cara menghitung PDRB dapat menggunakan tiga pendekatan (produksi, pendapatan, dan pengeluaran). Penjelasananya:

#### 1. Pendekatan Produksi

Perhitungan jumlah nilai akhir baik barang dan jasa dari berbagai unit produksi pada periode dan daerah tertentu (tahunan). Dengan menyajikan beberapa sektor didalamnya yakni; Penggalian dan Pertambangan, Pertanian, Pengolahan, Listrik, Air bersih dan Gas, Konstruksi dan Bangunan, Perdagangan, Resto dan hotel, Jasa Keuangan dan Asuransi, Persewaan dan Perusahaan, Pengangkutan dan Komunikasi, Jasa-Jasa, Informasi Komunikasi, Administrasi Pemerintah, dll

#### 2. Pendekatan Pengeluaran

Output perhitungan dengan pendekatan ini didasarkan pada output nilai produk dijadikan sebagai konsumsi rumah tangga akhir, adanya Lembaga Non-profit Rumah Tangga (LNPRT), dan pengeluaran pemerintah ditambah dengan investasi serta ekspor net (ekspor-impor)

#### 3. Pendekatan Pendapatan

Pendekatan pendapatan menggunakan jumlah balas jasa yang diterima seperti gaji atau upah, biaya sewa, bunga modal dll dalam proses produksi, semua pendapatan sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung serta pajak tidak net dan penyusutan.

Pendekatan pembangunan secara tradisional diartikan sebagai pembangunan pada peningkatan PDRB provinsi maupun kabupaten/kota. PDRB dapat menunjukkan beberapa aktivitas ekonomi yang dapat dijadikan sebagai indikator ekonomi pada daerah tertentu dan tahun tertentu tumbuh, walaupun tetap memerlukan indikator pendukung lainnya. Nilai tambah pada barang atau jasa tentunya merupakan indikator positif jika proses pembangunan pada suatu daerah tersebut mulai berhasil karena pendapatan untuk dibelanjakan dan distribusi pendapatan mengalami kenaikan akan berdampak pada penyerapan tenaga kerja yang lebih banyak.

#### **2.2.5 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)**

Tingkat pengangguran terbuka merupakan tingkatan persentase jumlah orang yang menganggur terhadap jumlah angkatan kerja. Masyarakat yang masuk kategori

angkatan kerja yakni penduduk dengan usia 15 tahun ke atas, baik pada kondisi sedang bekerja atau memiliki pekerjaan namun paruh waktu maupun sedang menganggur. Pengangguran sendiri memiliki kriteria yakni (a) penduduk yang sedang aktif mencari pekerjaan, (b) penduduk yang sedang menyiapkan usaha/pekerjaan baru, (c) masyarakat yang tidak bekerja karena merasa tidak mampu, dan (d) masyarakat yang tidak aktif mencari pekerjaan karena sudah memiliki pekerjaan namun belum memulai bekerja.

Menurut Todaro dalam Nurmainah (2013) pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan angkatan kerja secara tradisional dianggap sebagai faktor positif yang memacu pertumbuhan ekonomi, yakni : (a) Jumlah tenaga kerja yang besar berarti akan menambah jumlah tenaga yang produktif, sedangkan pertumbuhan penduduk yang lebih besar berarti ukuran domestiknya lebih besar. (b) Tenaga kerja dari sektor subsisten akan pindah secara perlahan dan dalam proses perpindahan tenaga kerja dan pertumbuhan tingkat pengerjaan di perkotaan mengakibatkan pertumbuhan output di sektor modern atau pusat kota tersebut. Kedua hal ini tergantung pada tingkat akumulasi modal industri di sektor modern. Dengan adanya investasi pada sektor modern, dengan anggapan pendapatan rata-ratanya dianggap konstan maka akan menarik tenaga kerja dari sektor pertanian tradisional. Tentunya akan terjadi penambahan tenaga kerja dan akan menaikkan produk yang dihasilkan pada sektor modern. Tentunya yang menjadi masalah adalah ketika adanya perpindahan ini tidak diimbangi dengan tersedianya lapangan pekerjaan maka akan menjadi boomerang tersendiri bagi sektor modern, karena akan terjadi pengangguran yang merajalela.

Menurut Sadono Sukirno (2000) dalam (van/indrawiguna, 2013) pengangguran dibedakan atas 3 jenis berdasarkan keadaan yang menyebabkannya, antara lain:

1. Pengangguran friksional, yaitu pengangguran yang disebabkan oleh tindakan seseorang pekerja untuk meninggalkan kerjanya dan mencari kerja yang lebih baik atau sesuai dengan keinginannya.
2. Pengangguran struktural, yaitu pengangguran yang disebabkan oleh adanya perubahan struktur dalam perekonomian.

3. Pengangguran konjungtur, yaitu pengangguran yang disebabkan oleh kelebihan pengangguran alamiah dan berlaku sebagai akibat pengurangan dalam permintaan agregat.

Tingkat pengangguran terbuka sendiri dihitung dengan indikator jumlah pengangguran (PP) dan jumlah angkatan kerja (PAK), yakni:

$$TPT = \frac{PP}{PAK} \times 100\%$$

Hasil perhitungan ini, mengidentifikasi seberapa besar nilai persentase angkatan kerja yang termasuk pengangguran. Semakin besar nilai ini, maka persediaan tenaga kerja yang menganggur semakin banyak. Besar kecilnya persentase juga dipengaruhi oleh beberapa kejadian, seperti resesi, perubahan bisnis dan lain-lain. Sehingga nilai ini dapat menjadi indikator mengenai kejadian yang berlangsung pada pasar atau ekonomi tertentu.

#### **2.2.6 Upah Minimum**

Menurut M.Nasir dalam (Setya Ningrum, 2017) permasalahan kemiskinan merupakan permasalahan kompleks dan multidimensi. Kemiskinan di Indonesia disebabkan oleh berbagai faktor, yaitu tingkat upah kurang, tingkat pengangguran yang tinggi, dan IPM yang masih kurang. Dapat dikatakan miskin apabila belum bisa mencukupi kebutuhannya atau belum berpenghasilan. Upah sendiri menjadi tolak ukur di masyarakat mengenai tingkat kesejahteraan. Kenaikan upah dapat diartikan naiknya kesejahteraan bagi sebagian masyarakat, begitu pula sebaliknya. Tingkat pendidikan yang dimiliki tenaga kerja akan mempengaruhi keputusan kapan mereka bekerja dengan membandingkan besarnya timbal balik yang didapat atau upah dengan tingkat pendidikan yang telah mereka tempuh hal ini diungkapkan oleh Payaman J. Simanjuntak dalam (Ekonomi et al., 2013).

KEP- 226/MEN/2000 Tahun 2000 merupakan ikhtiar pemerintah untuk melindungi pekerja agar mendapatkan upah yang wajar dan hidup layak, serta menjadi acuan bagi pengusaha dalam memenuhi kewajibannya membayar upah bagi buruh atau pekerja. Kebijakan UMP didasari pada teori kekakuan upah dimana Upah tidak selalu bisa fleksibel atau tidak bisa melakukan penyesuaian sampai penawaran tenaga kerja sama dengan permintaannya. Hal ini berarti nilai UMP selalu berada



diatas keseimbangan pasar tenaga kerja, dan pengusaha harus menambah biaya produksinya guna mengikuti peraturan yang telah ditentukan. Akan tetapi tidak semua perusahaan informal dapat memberikan upah setara atau yang telah ditetapkan, karena adanya perbedaan pendapatan serta cost yang berbeda-beda antar perusahaan serta biaya sosial dan inflasi. Banyaknya uang dicetak oleh pemerintah tidak menyebabkan upah bergantung pada uang dicetak. Jika pemerintah menurunkan inflasi dengan memperlambat tingkat pertumbuhan uang, para pekerja tidak melihat upah naik dengan cepat. Pada saat inflasi mengalami kelambatan, perusahaan akan sedikit menaikkan harga produk setiap tahunnya dan para pekerja menerima upah yang lebih kecil (Setya Ningrum, 2017).

Kualitas pada sumber daya manusia atau indeks pembangunan manusia, juga dapat menentukan tingkat upah yang diberikan, karena kaitannya dengan porsi jabatan dan tanggung jawab. Upah tinggi tentunya menjadi dambaan bagi setiap orang karena asumsinya dengan upah tinggi maka tingkat kesejahteraan juga tinggi, akibatnya banyak orang menganggur untuk mendapatkan pekerjaan dengan upah tinggi, namun tidak dibarengi dengan kualitas yang diharapkan. Sehingga akan menyebabkan jumlah Angkatan kerja yang menganggur menjadi bertambah dan ini akan berakibat naiknya angka kemiskinan. Dari penelitian sebelumnya juga disebutkan oleh Setya Ningrum (2017) jika upah minimum positif dan signifikan terhadap (Y). Nilai koefisien upah minimum sebesar  $1.33E-06$ , setiap kenaikan upah minimum sebesar 1 juta rupiah maka dapat meningkatkan (Y) sebesar  $1.33E-06$  juta rupiah dan sebaliknya.

Peningkatan kesejahteraan masyarakat yang merata merupakan tujuan dari pembangunan ekonomi. Pemerataan pembangunan adalah pemerataan pembangunan pusat dan daerah seperti yang diharapkan dalam penyelenggaraan otonomi daerah (van/indrawiguna, 2013). Sehingga, variable-variabel diatas digunakan untuk melihat seberapa besar pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, pengangguran, upah, serta pengeluaran pemerintah dan investasi terhadap kemiskinan yang terjadi di Kota Semarang, Kota Salatiga, dan Kota Surakarta pada tahun 2017-2021. Dengan begitu kita juga akan melihat bagaimana kekurangan yang harus ditingkatkan pada kota-kota untuk dilakukan kajian lebih dalam.

## **2.3 Hubungan Antar Variabel**

### **2.3.1 Hubungan IPM terhadap Kemiskinan**

Rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) akan berakibat pada rendahnya produktivitas kerja dari penduduk. Produktivitas yang rendah berakibat pada rendahnya perolehan pendapatan. Sehingga dengan rendahnya pendapatan menyebabkan tingginya jumlah penduduk miskin.

### **2.3.2 Hubungan Dana Bagi Hasil terhadap Kemiskinan**

Adanya transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah tentunya tidak hanya untuk keberlangsungan internal pemerintah, tetapi juga untuk pembangunan daerah-daerah serta untuk peningkatan berbagai sektor yang menjadi keunggulan maupun sektor yang masih lemah. Pembangunan yang dikerjakan dalam jangka pendek tentu akan menyerap tenaga kerja serta jangka panjang akan menumbuhkan perekonomian secara bertahap. Ekonomi yang tumbuh dan tenaga kerja yang terserap akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitarnya dan kemiskinan dapat di tekan.

### **2.3.3 Hubungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Kemiskinan**

Pertumbuhan ekonomi tidak hanya melihat adanya jumlah nilai tambah pada suatu barang/jasa tetapi juga harus memperhatikan persebaran pendapatan pada lapisan masyarakat secara keseluruhan, dan bagaimana pendapatan itu menjadi penopang kehidupan. Ketika angka PDRB turun tentu akan berdampak terhadap kualitas konsumsi pada masyarakat karena artinya jumlah nilai tambah pada barang/jasa juga menurun, baik dipengaruhi oleh kondisi ekonomi maupun sosial.

### **2.3.4 Hubungan Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Kemiskinan**

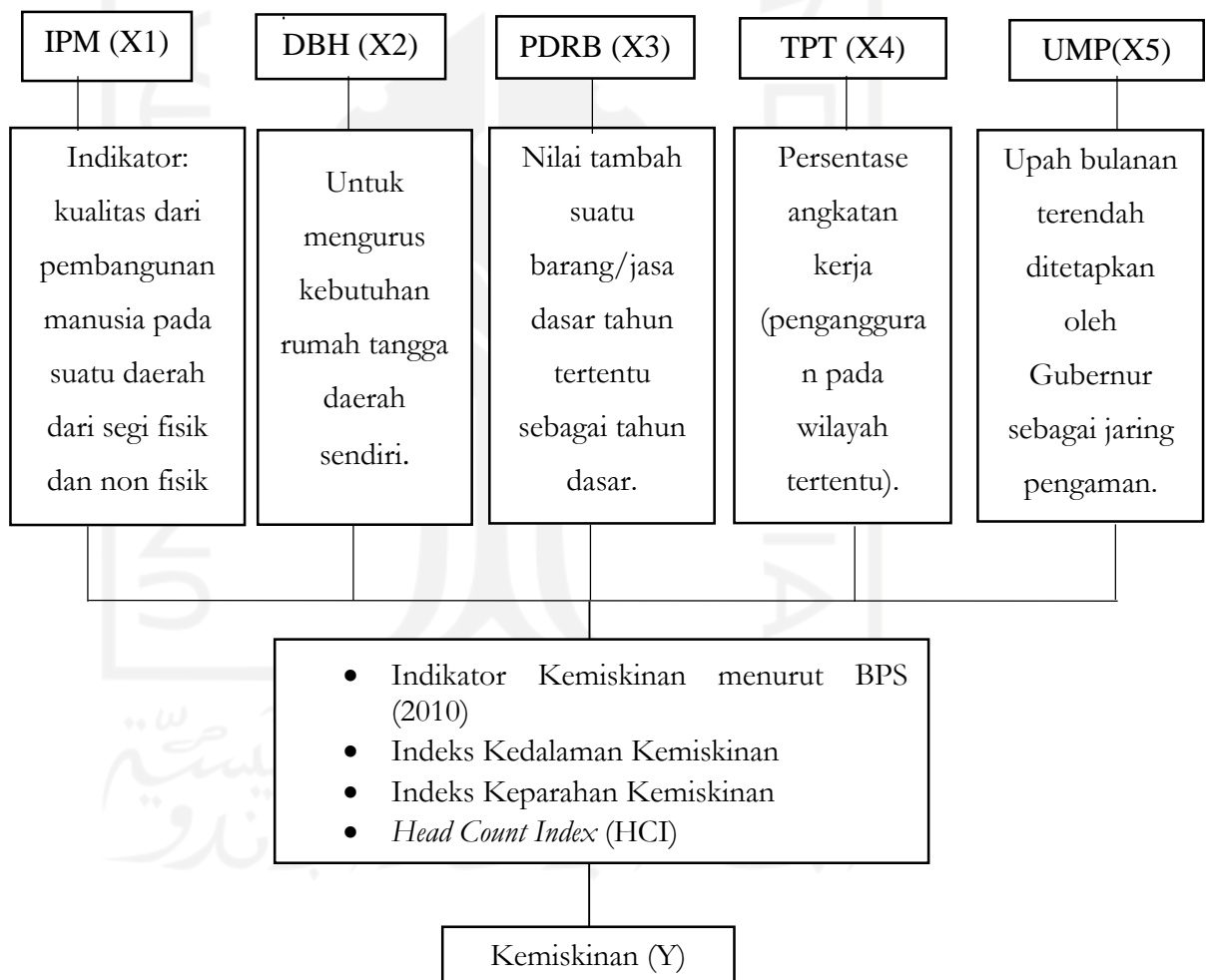
Kenaikan tingkat pengangguran yang bertanda positif akan mengakibatkan kemiskinan menguat. Pengangguran berdampak mengurangi pendapatan masyarakat, sehingga akan menurunkan tingkat kemakmuran yang mereka capai. Seseorang yang menganggur tidak memiliki pendapatan dari pekerjaannya.

### 2.3.5 Hubungan Upah Minimum terhadap Kemiskinan

Upah minimum juga memberikan dampak terhadap tingkat kemiskinan melalui peningkatan rata-rata upah, dimana tingkat kemiskinan ikut berkurang seiring meningkatnya rata-rata upah pekerja, namun peningkatan pengangguran akibat dari upah minimum yang meningkat juga memberikan pengaruh pada bertambahnya tingkat kemiskinan.

### 2.4 Kerangka Pemikiran

Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran



Kerangka pemikiran pada penelitian ini adalah bahwa kemiskinan dipengaruhi oleh lima variabel pembangunan ekonomi, antara lain indeks pembangunan manusia, dana bagi hasil, produk domestik regional bruto, tingkat pengangguran, dan upah minimum. IPM sebagai indikator pertumbuhan sumber daya manusia. DBH sebagai intervensi pemerintah dalam meningkatkan pendapatan daerah melalui dana perimbangan. PDRB sebagai indikator pertumbuhan perekonomian pada wilayah dan tahun dasar tertentu. Tingkat pengangguran untuk menggambarkan kemampuan perekonomian dalam penyediaan lapangan pekerjaan, dimana akan sangat berpengaruh pada distribusi pendapatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, upah minimum untuk menunjukkan intervensi pemerintah dalam proses pembangunan pada sektor perekonomian serta sebagai indikator kesejahteraan masyarakat.

## **2.5 Hipotesis**

Sesuai dengan landasan teori dan beberapa hasil penelitian terdahulu, maka dugaan sementara ialah:

1. Diduga Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh negatif terhadap kemiskinan di tingkat Kota Provinsi Jawa Tengah.
2. Diduga Dana Bagi Hasil berpengaruh negatif terhadap kemiskinan di tingkat Kota Provinsi Jawa Tengah.
3. Diduga Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh negatif terhadap kemiskinan di tingkat Kota Provinsi Jawa Tengah.
4. Diduga Tingkat Pengangguran Terbuka berpengaruh positif terhadap kemiskinan di tingkat Kota Provinsi Jawa Tengah.
5. Diduga Upah Minimum Regional berpengaruh negatif terhadap kemiskinan di tingkat Kota Provinsi Jawa Tengah.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Jenis dan Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, yakni penelitian dengan menggunakan data sekunder berupa kelompok angka dan diolah menggunakan statistika. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel yang menggabungkan deret waktu (*time series*) dari tahun 2017-2021 serta data deret lintang (*cross section*) sebanyak 3 kota di Provinsi Jawa Tengah yakni Kota Surakarta, Kota Salatiga dan Kota Semarang. Data panel menghasilkan 15 observasi. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode sekunder, yakni peneliti mengumpulkan data literatur yang berkaitan berupa dokumen, artikel, jurnal ilmiah serta data publikasi dari Badan Pusat Statistika Provinsi Jawa Tengah dengan berbagai macam tahun publikasi dengan periode 2017-2021. Peneliti hanya memilih ketiga kota tersebut karena, kota tersebut menjadi pusat pembangunan dari Provinsi Jawa Tengah khususnya dalam pendidikan, kesehatan dan ekonomi.

#### 3.2 Definisi Operasional Variabel

Pada penelitian ini menggunakan empat variabel bebas (*independen*) yaitu Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Pengangguran Terbuka, Laju Pertumbuhan Penduduk, dan Upah Minimum. Sedangkan variabel terikat (*dependen*) adalah Kemiskinan. Berikut adalah penjelasan definisi operasional variabel:

##### 1. Kemiskinan (Y)

Ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhannya baik dari kebutuhan pangan, sandang maupun papan minimum. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang didapatkan pada Badan Pusat Statistika Jawa Tengah pada tahun 2017-2021. Data tersebut berupa persentase masyarakat (dalam satuan persen) pada Kota Surakarta, Kota Salatiga, Kota Semarang.

##### 2. Indeks Pembangunan Manusia (X1)

Indeks pembangunan manusia sendiri digunakan oleh BPS sebagai indikator mengukur keberhasilan proses pembangunan, kaitannya dengan pembangunan manusia sebagai sumber daya bangsa yang mengacu terhadap sejumlah komponen-komponen kualitas hidup. Adapun dimensi pembentuknya meliputi : (1) panjang

umur, kesehatan (2) standar hidup (3) ilmu pengetahuan. Data dalam penelitian ini merupakan data dengan pengolahan metode terbaru untuk Provinsi Jawa Tengah dengan rentang waktu 2017-2021, dengan data dalam bentuk persentase.

### 3. Dana Bagi Hasil (X2)

Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diambil dari laman Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan yakni pada portal TKDD. DBH sendiri menjadi indikator untuk melihat intervensi yang dilakukan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam hal transfer dana guna proses pembangunan daerah serta mengurangi kesenjangan fiskal, dimana pembangunan tadi memberi implikasi kepada kemiskinan daerah.

### 4. Produk Domestik Regional Bruto (X3)

PDRB dapat melihat adanya pertumbuhan ekonomi yang mana salah satu indikator tercapainya pembangunan daerah. Melihat pertumbuhan sebagai bahan evaluasi serta pondasi dasar untuk perencanaan dan kebijakan tahun yang akan datang. Data sekunder tersebut diambil pada Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah sebagai badan yang mengelola berbagai data.

### 5. Tingkat Pengangguran Terbuka (X2)

Data (dalam persen) penduduk dengan usia kerja yang saat ini bekerja maupun pekerja sementara dan pengangguran merupakan pengertian mengenai angkatan kerja. Data ini membantu menunjukkan tingkat ekonomi dalam menciptakan lapangan pekerjaan yang tersedia bagi tenaga kerja. Semakin tinggi angka, semakin tinggi tingkat persediaan tenaga kerja yang tersedia.

### 6. Upah Minimum (X4)

Upah minimum merupakan hasil dari *invisible hand* pemerintah daerah yang jumlahnya telah diatur dalam peraturan daerah, yang penerimaan minimum yang berlaku pada masing-masing provinsi. Data yang diambil merupakan data upah minimum Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2017-2021 (dalam rupiah).

## 3.3 Metode Analisis

Dengan penelitian kuantitatif maka membutuhkan data yang nantinya diuji dengan metode statistik untuk menjawab pertanyaan rumusan masalah. *E-views 10* digunakan sebagai olah data yang sudah ada yakni panel yakni gabungan *time series*

dengan *cross section* dalam excel. Data panel digunakan untuk menghindari ada keterbatasan data, heterogenitas dan variasi data perubahan waktu. Selain itu, data panel juga dapat menjelaskan informasi antar unit dan antar waktu. Dengan persamaan sebagai berikut :

*Cross section :*

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \varepsilon_1 = 1, 2, \dots, n$$

Keterangan:

$\beta_0$  = bilangan konstanta

$\beta_1$  = koefisien regresi

$\varepsilon_1$  = variabel error

*Time series :*

$$Y_t = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \varepsilon_1 = 1, 2, \dots, n$$

Fungsi t = jumlah periode

$\beta_0$  = bilangan konstanta

$\beta_1$  = koefisien regresi

$\varepsilon_1$  = variabel error

Data panel :

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \varepsilon_{it} = 1, 2, \dots, t \quad n = 1, 3, \dots, n; \quad t = 1, 2, \dots, t$$

N = variabel bebas

I = jumlah unit

T = periode waktu

Sehingga, bentuk regresi data panel yakni :

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \beta_4 X_{4it} + \varepsilon$$

Keterangan:

$Y_{it}$  = Kemiskinan

$\beta_0$  = Bilangan konstanta

$\beta_1 \beta_2 \dots$  = Koefisien regresi

X1 = Indeks Pembangunan Manusia metode terbaru Kab/Kota Provinsi Jawa Tengah 2017-2021, diterbitkan oleh badan pusat statistika Jawa Tengah (dalam persen)

- X2 = Dana Bagi Hasil tingkat Kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2017-2021 (dalam jutaan rupiah)
- X3 = Produk Domestik Regional Produk tingkat Kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2017-2021 (dalam jutaan rupiah)
- X4 = Tingkat Pengangguran terbuka Kab/Kota Provinsi Jawa Tengah 2017-2021 (dalam persen)
- X5 = Upah Minimum Kab/Kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2017-2021 (dalam rupiah)
- $\varepsilon_1$  = Variabel eror

### 3.4 Estimasi Model Regresi Data Panel

Data panel atau data gabungan antara data *cross section* dengan *time series*. Data ini dapat memberikan ketersediaan jumlah observasi yang akan dianalisis. Berikut merupakan beberapa metode estimasi:

#### 3.4.1 *Common effect model (CEM)*

Metode CEM adalah metode yang berasumsi bahwa intercept dan slope pada setiap subjek dan setiap waktu adalah sama. Asumsi adanya perbedaan intersep dan slope dijelaskan oleh variabel pengganggu. Model ini merupakan yang sederhana karena hanya menggabungkan data dan regresi menggunakan Ordinary Least Square (OLS) (E. Nur Amaliah, Darnah, 2020). Metode OLS adalah metode yang umum digunakan dalam menduga parameter regresi linier.

#### 3.4.2 *Fixed effect model (FEM)*

Metode FEM berasumsi bahwa intersep berbeda antar subjek dan slope sama antar subjek, serta bersifat tetap. Metode ini menggunakan variabel dummy sesuai dengan definisi serta kriteria masing-masing asumsi dalam mengungkapkan perbedaan intersep. Menurut (Intan, 2022) tujuan adanya variabel dummy adalah untuk menurunkan tingkat heterogenitas.

#### 3.4.3 *Random effect model (REM)*

Metode REM berasumsi bahwa variabel residual memiliki hubungan antar waktu dan antar subjek serta bersifat random. Akibatnya terjadi perbedaan intersep dan konstanta.

### Model Estimasi



Dalam memilih model, ada beberapa cara yang digunakan dalam menentukan teknik mana yang paling tepat dalam mengestimasi data panel, antara lain :

#### 3.4.4 Uji Hausman

Merupakan model pengujian dalam statistika untuk menentukan fixed effect atau random effect dalam penelitian. Dalam uji hausman ini juga terdapat hipotesis yakni:

H0 = memilih REM, jika nilai Chi-Square tidak signifikan pada  $\alpha$  5%

H1 = memilih FEM, jika nilai Chi-Square signifikan pada  $\alpha$  5%

Nilai Chi-Square pada model ini dijadikan acuan sebagai penentuan model fixed effect model atau random effect model, dengan derajat kebebasan sebesar jumlah variabel bebas. Chi-square berasumsi bahwa jika nilai hausman lebih besar dibandingkan dengan nilai kritis Chi-square maka menolak H0 dengan fixed effect model dinilai tepat digunakan dalam regresi. Dan jika nilai hausman lebih kecil dari nilai kritis Chi-square maka menerima H0 dengan random effect model dinilai tepat dalam regresi data panel ini.

#### 3.4.5 Uji Chow

Merupakan model pengujian dalam statistika untuk menentukan fixed effect model atau common effect dalam penelitian. Penambahan variabel dummy biasanya digunakan untuk perbedaan intersepanya melalui uji ini. Adapun hipotesis yang digunakan yakni :

H0 = memilih CEM, jika nilai prob.F tidak signifikan pada  $\alpha$  5% atau intersep sama

H1 = memilih FEM, jika nilai prob.F signifikan pada  $\alpha$  5% atau intersep tidak sama.

Nilai F hitung akan mengikuti distribusi F statistik dengan derajat kebebasan sebanyak m untuk numerator dan n-k untuk denominator.

m = jumlah individu dikurangi satu atau pembatasan dalam model tanpa diikuti variabel dummy

n = jumlah observasi

k = jumlah parameter dalam fixed effect model

Jika dari hasil perhitungan nilai F hitung lebih besar dari F kritis maka menolak H0, artinya model yang tepat pada regresi tersebut adalah fixed effect

model. Begitu juga sebaliknya, apabila nilai F hitung lebih kecil dari F kritis maka menerima H<sub>0</sub>, artinya model yang tepat adalah common effect model.

#### **3.4.6 Uji LM (*Lagrange Multiplier*)**

Merupakan model pengujian dalam statistika untuk menentukan random effect model atau common effect model dalam penelitian. Pada pengujian ini didasarkan pada distribusi nilai LM dan Chi-Square dengan derajat kebebasan (df) sebesar jumlah variabel independen. Adapun hipotesis yang digunakan :

H<sub>0</sub> = memilih CEM, jika LM tidak signifikan pada  $\alpha$  5%

H<sub>1</sub> = memilih REM, jika LM signifikan pada  $\alpha$  5%

Nilai LM pada model ini dijadikan acuan sebagai penentuan, dengan derajat kebebasan sebesar jumlah variabel bebas. Uji ini berasumsi bahwa jika nilai LM lebih besar dibandingkan dengan nilai kritis Chi-square maka menolak H<sub>0</sub> dengan random effect model dinilai tepat digunakan dalam regresi. Dan jika nilai hausman lebih kecil dari nilai kritis Chi-square maka menerima H<sub>0</sub> dengan common effect model dinilai tepat dalam regresi data panel ini.

### **3.5 Uji Statistik**

Adapun beberapa uji statistik yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: koefisien determinan (R<sup>2</sup>), Uji Koefisien Regresi bersama (Uji F) dan Uji Koefisien Regresi Parsial (Uji t).

#### **3.5.1 Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)**

Koefisien determinasi dilakukan untuk mengetahui seberapa baik nilai R<sup>2</sup> dalam persentase. Dengan besaran dari proporsi variabel dependen yang dijelaskan oleh model dan sisanya tidak dijelaskan menggunakan model. Dengan asumsi semakin tinggi nilai R<sup>2</sup> maka semakin kuat tingkat hubungan antara variabel dependen dan independen.

#### **3.5.2 Koefisien Regresi Bersama (Uji F)**

Uji F digunakan untuk menguji variabel secara bersamaan, dengan hipotesis sebagai berikut:

$$H_0 = \beta_1 = \beta_2 = 0$$

$$H_1 = \beta_1 \neq \beta_2 \neq 0$$

Dengan asumsi, jika F hitung lebih besar dari F tabel (kritis) maka menolak H0, sebaliknya jika F hitung lebih kecil dari F tabel (kritis) maka akan menerima H0.

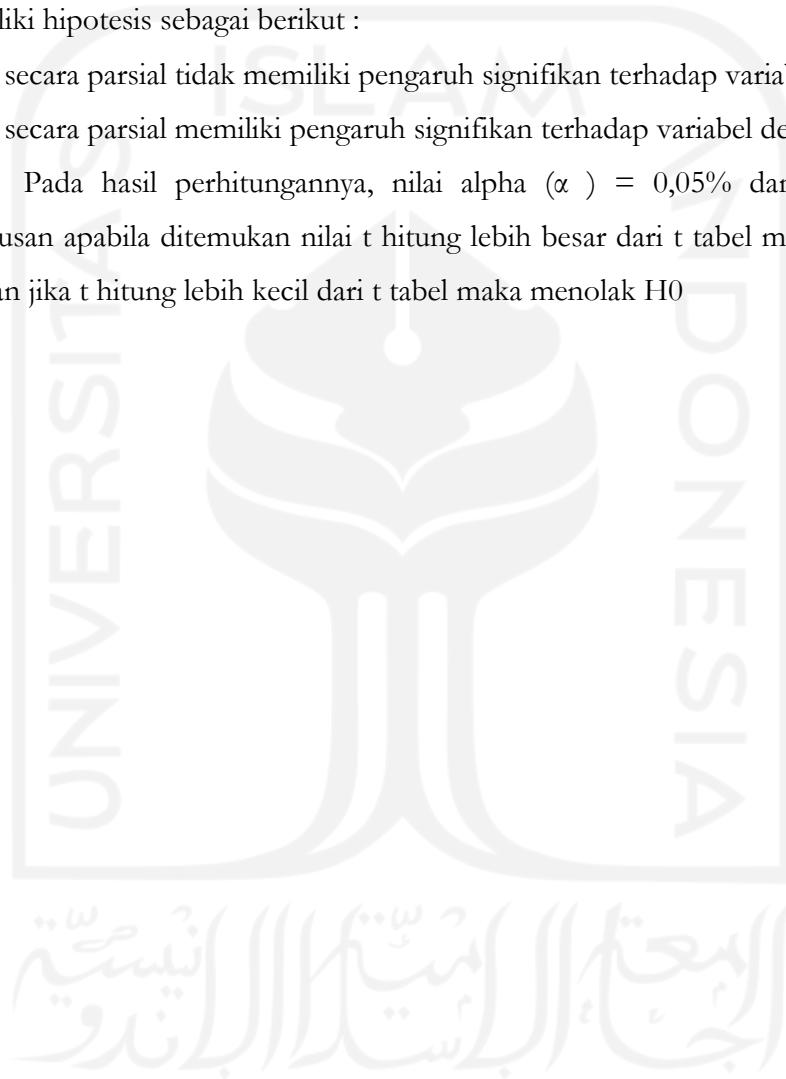
### 3.5.3 Koefisien Regresi Parsial (Uji t)

Koefisien Regresi Parsial digunakan untuk merumuskan hipotesis statistik, derajat kesalahan ( $\alpha$ ), t kritis atau t tabel, serta putusan hipotesis. Pengujian ini memiliki hipotesis sebagai berikut :

H0 = secara parsial tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen

H1 = secara parsial memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen

Pada hasil perhitungannya, nilai alpha ( $\alpha$ ) = 0,05% dan df. Dengan keputusan apabila ditemukan nilai t hitung lebih besar dari t tabel maka menerima H0 dan jika t hitung lebih kecil dari t tabel maka menolak H0



## BAB IV PEMBAHASAN

### 4.1 Analisis Data

Statistik deskriptif pada analisis data digunakan peneliti dalam menganalisis data, yakni dengan cara mendeskripsikan gambaran data-data yang telah terkumpul. Dengan data panel, yaitu gabungan dari data *time series* dengan *cross-section* tingkat Kota Provinsi Jawa Tengah pada periode tahun 2017-2021. Regresi dengan menggunakan model effect yakni: CEM, FEM, dan REM. Ketiganya merupakan model yang biasa digunakan oleh peneliti guna mengetahui nilai korelasi antar variabel dan bagaimana pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependent. Untuk mengetahui hal tersebut maka ketiganya harus diuji dengan menggunakan eviws.

Observasi sebanyak 30 pengamatan, yang didapatkan dari 6 kota yang ada di Provinsi Jawa Tengah dan dikalikan oleh 5 tahun periode analisis, antara tahun 2017-2021. Observasi ini mendapatkan hasil yakni:

**Tabel 4.1 Statistik Deskriptif**

Variabel	Mean	Standar Deviasi	Nilai Max	Nilai Min
Penduduk Miskin	31.2017	25.2429	84.45	9.1
IPM	79.2557	3.62826	83.6	73.77
DBH	58.1527	58.0458	222.21	19.81
PDRB	33899381	47297665	144710663	5820532
TPT	6.53733	1.79976	9.57	3.96
UMP	1919797	333801	2810025	1453000

Dapat dilihat pada tabel 4.1 menunjukkan garis besar hasil perhitungan yang mengacu data asli pada tahun 2017-2021. Nilai *mean* dan standar deviasi pada jumlah penduduk sebesar 31,201 dan 25,242 serta nilai tertinggi 84,45 ribu jiwa (Kota Semarang tahun 2021) dan nilai terendah 9,1 ribu jiwa (Kota Magelang tahun 2019). *Mean* dan standar deviasi pada IPM masing-masing sebesar 79,255 persen dan 3,628 persen serta nilai tertinggi pada angka 83,6 (Kota Salatiga tahun 2021) dan nilai terendah di angka 73,77 persen (Kota Tegal 2017). *Mean* dan standar deviasi pada

DBH dalam rentang lima tahun, masing-masing sebesar 58,152 dan 58,045 serta nilai tertinggi pada angka 222,21 (Kota Semarang tahun 2021) dan nilai terendah di angka 19,81 (Kota Salatiga 2019). Nilai *mean* dan standar deviasi pada PDRB sebesar 33899381 dan 47297665 serta nilai tertinggi Rp.144710663 juta (Kota Semarang tahun 2021) dan nilai terendah Rp.5820532 juta (Kota Magelang tahun 2017). Besar *mean* dan standar deviasi pada TPT sebesar 6,537 dan 1,799 serta nilai tertinggi 9,57 (Kota Semarang tahun 2020) dan nilai terendah 3,96 (Kota Salatiga tahun 2017). *Mean* dan standar deviasi pada UMP dalam rentang lima tahun, masing-masing sebesar 1919797 dan 333801 serta nilai tertinggi pada angka Rp. 2810025 (Kota Semarang tahun 2021) dan nilai terendah di angka Rp.145300 (Kota Magelang 2017).

#### 4.2 Analisis Regresi Data Panel

Regresi data panel merupakan cara yang digunakan dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang menjadi tujuan penelitian. Pemilihan model dilakukan dengan melakukan perbandingan melalui Uji *Hausman* dan Uji *Chow* dari hasil mode CEM, FEM dan REM agar mendapatkan hasil terbaik.

##### 4.2.1 Hasil Uji *Fixed effect model*

**Tabel 4.3 Hasil Uji FEM**

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	368.0472	126.3417	2.913110	0.0089
IPM	-4.690615	1.709475	-2.743892	0.0129
DBH	0.132703	0.022498	5.898377	0.0000
PDRB	-4.44E-09	1.24E-07	-0.035746	0.9719
TPT	-0.400461	0.343151	-1.167013	0.2576
UMP	1.56E-05	6.76E-06	2.308953	0.0324
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
R-squared	0.997794	Mean dependent var	31.20167	
Adjusted R-squared	0.996633	S.D. dependent var	25.24290	

S.E. of regression	1.464703	Akaike info criterion	3.877757
Sum squared resid	40.76174	Schwarz criterion	4.391529
Log likelihood	-47.16635	Hannan-Quinn criter.	4.042117
F-statistic	859.4452	Durbin-Watson stat	1.829219
Prob(F-statistic)	0.000000		

#### 4.2.2 Hasil Uji *Chow*

**Tabel 4.5 Hasil Uji Chow**

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	214.117339	(5,19)	0.0000
Cross-section Chi-square	121.473442	5	0.0000

Adapun hipotesis pada regresi berikut adalah:

H<sub>0</sub> : Model common effect lebih baik

H<sub>a</sub> : Model fixed effect lebih baik

Dari hasil diatas dapat disimpulkan bahwa nilai *Prob. Cross section Chi-Square* adalah  $0,0000 < \alpha$  sebesar 0,05. Dapat disimpulkan bahwa uji hipotesisnya menolak H<sub>0</sub> atau menyimpulkan bahwa model *Fixed Effect Model* lebih baik dibandingkan dengan model *Common Effect Model*.

#### 4.2.3 Hasil Uji *Hausman*

**Tabel 4.6 Hasil Uji Hausman**

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	1070.586687	5	0.0000

Adapun hipotesis pada regresi berikut adalah:

H<sub>0</sub> : Model random effect lebih baik

Ha : Model fixed effect lebih baik

Hasil diatas menunjukkan bahwa uji *Hausman* tersebut menghasilkan nilai *Prob. Cross section random* sebesar 0,0000 yang memiliki nilai < dari *alpha* sebesar 0,05. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa pada uji kali ini nilai P lebih lebih kecil dibandingkan dengan *alpha* sebesar 5 persen, dan artinya menolak H0 atau model *Fixed Effect Model* lebih baik dibandingkan dengan model *Random Effect Model*.

Dari perbandingan ko model ini dapat menjawab pertanyaan pada rumusan masalah dimana nantinya akan mengacu kepada hasil regresi data panel dengan menggunakan model *Fixed Effect Model*. Dan menghasilkan model *Fixed Effect Model* sebagai berikut :

$$JK = 368.0472 - 4.690615 \text{ IPM} + 0.132703 \text{ DBH} - 4.44\text{E-}09 \text{ PDRB} - 0.400461 \text{ TPT} + 1.56\text{E-}05 \text{ UMP}$$

### 4.3 Uji Statistik

#### 4.3.1 Koefisien Determinasi

Koefisien ini berperan sebagai pengukur besarnya kemampuan model dalam menjelaskan variasi dari variabel terikat.

**Tabel 4.7** Koefisien Determinasi

R-squared	0.997794
Adjusted R-squared	0.996633

Tabel 4.7 diatas memperlihatkan hasil dari koefisien determinasi, dimana hasil tersebut mengacu kepada hasil regresi menggunakan model *Fixed Effect Model*, dengan nilai R-square sebesar 0.997794. Menunjukkan bahwa kemampuan variabel independen (IPM, DBH, PDRB, TPT, dan UMP) dalam menjelaskan keragaman terhadap variabel dependen (Jumlah penduduk miskin) yaitu sebesar 99,77 persen. Dengan sisanya dijelaskan oleh variabel lain diluar variabel independen tersebut sebesar 0,23 persen.

#### 4.3.2 Uji F

Uji F digunakan dalam mengetahui dan menganalisa bagaimana pengaruh variabel independen dengan variabel dependen secara simultan.

**Tabel 4.8 Uji F**

F-statistic	859.4452
Prob(F-statistic)	0.000000

Tabel diatas memperlihatkan bahwa hasil uji F yang mengacu terhadap model *Fixed Effect Model*, dengan melihat nilai *prob (F-statistic)* sebesar  $0,000000 < \alpha$  sebesar 0,05. Artinya pada uji kali ini, dapat disimpulkan bahwa variabel independen (IPM, DBH, PDRB, TPTP, dan UMP) secara simultan memiliki pengaruh terhadap variabel dependen (jumlah penduduk miskin).

#### 4.3.3 Uji t

Uji t-statistik untuk memperlihatkan dimana pengaruh setiap variabel independen terhadap variabel dependen, dengan anggapan variabel independen adalah konstan.

**Tabel 4.9 Uji t**

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	368.0472	126.3417	2.913110	0.0089
IPM	-4.690615	1.709475	-2.743892	0.0129
DBH	0.132703	0.022498	5.898377	0.0000
PDRB	-4.44E-09	1.24E-07	-0.035746	0.9719
TPT	-0.400461	0.343151	-1.167013	0.2576
UMP	1.56E-05	6.76E-06	2.308953	0.0324

Tabel diatas memperlihatkan hasil dari regresi uji t dimana ini menggunakan estimasi model *Fixed Effect Model* sebagai acuan. Menunjukkan bahwa variabel independen IPM, DBH dan UMP memiliki nilai *prob* < dari *alpha* sebesar 0,05 atau 5 persen. Ini menunjukkan bahwa ketiga variabel independen diatas memiliki pengaruh terhadap variabel dependen yakni Jumlah Kemiskinan.

#### 4.4 Hasil dan Pembahasan

Analisis yang telah dilakukan oleh peneliti, digunakan analisis regresi panel dengan model *Fixed Effect Model*. Dimana hasil tersebut memperlihatkan pada



variabel independen yang berjumlah lima yakni IPM, DBH, PDRB, TPT dan UMP memiliki pengaruh terhadap kemiskinan yang menitikberatkan kepada jumlah masyarakat miskin (individu). Besarnya pengaruh telah diukur menggunakan uji statistik dengan koefisien determinasi sebesar 99,77 persen, yang menunjukkan besarnya variabel independen dalam menjelaskan variasi kemiskinan pada tingkat kota Provinsi Jawa Tengah.

### **1. Pengaruh IPM terhadap kemiskinan**

Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel Indeks Pembangunan Manusia memiliki koefisien sebesar -4.690615, setiap kenaikan 1 persen IPM akan mengurangi jumlah penduduk miskin sebesar 4.690615 persen dan begitu juga sebaliknya. IPM dari hasil penelitian ini juga menghasilkan nilai *prob* sebesar  $0,0129 < \alpha$  sebesar 0,05 artinya IPM berpengaruh signifikan dan negatif.

Kenaikan IPM akan membuat kenaikan dalam hal sumber daya, dimana kenaikannya akan berpengaruh terhadap produktivitas yang meningkatkan kesejahteraan dan menurunkan tingkat kemiskinan. Hal ini menjelaskan jika peningkatan indeks pembangunan manusia akan mempengaruhi penurunan jumlah kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. Hal ini dimungkinkan suksesnya wajar pendidikan dua belas tahun, harapan hidup yang tinggi, serta kemampuan daya beli terhadap kebutuhan pokok.

### **2. Pengaruh DBH terhadap kemiskinan**

Hasil analisis yang dilakukan menunjukkan bahwa variabel Dana Bagi Hasil mendapatkan nilai koefisien sebesar 0,132703 dan nilai *prob* sebesar  $0,0000 < \alpha$  0,05 artinya DBH berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan. DBH memiliki pengaruh positif terhadap Jumlah Penduduk Miskin. Dengan asumsi jika DBH mengalami kenaikan 1 persen, maka jumlah penduduk miskin mengalami kenaikan sebesar 0,132703 persen.

Secara substansi, alokasi DBH terbesar diambil dari DBH pajak dan DBH SDA kehutanan PSDH. Selain itu, pada variabel DBH yang bersumber dari DBH pajak menjadi sumber tertinggi pada Kota di Jawa Tengah. Hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat patuh pajak. Disisi lain, kepatuhan pajak tersebut membuat pendapatan masyarakat berkurang untuk meningkatkan kualitas kebutuhan dasar. Penggunaan dana tersebut juga ternyata tidak berorientasi langsung kepada

penurunan kemiskinan yakni berfokus terhadap pendanaan program/kegiatan peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan bidang cukai dan pemberantasan barang ilegal.

Dapat disimpulkan jika kenaikan dana bagi hasil berarti naik juga pendapatan pemerintah melalui pajak juga mengalami kenaikan. Akan tetapi, kenaikan tersebut tidak kembali kepada masyarakat untuk menurunkan kemiskinan.

**Tabel 4.10 DBH Jawa Tengah 2021** (dalam ribuan rupiah)

	DANA BAGI HASIL							
	DBH PAJAK			DBH SUMBER DAYA ALAM				
	PPH	PBB	CHT	KEHUTANAN	MIGAS	MINE RBA	PERIKANAN	PANAS BUMI
KOTA MAGELANG	12.706.062	3.261.387	-	251.244	70.404	1.226	1.128.319	53.648
KOTA PEKALONGAN	12.878.121	3.596.942	-	251.244	70.404	1.226	1.128.320	54.648
KOTA SALATIGA	12.363.058	3.412.761	-	251.244	70.404	1.226	1.128.321	55.648
KOTA SEMARANG	130.724.743	6.703.887	-	405.587	70.404	1.226	1.128.322	56.648
KOTA SURAKARTA	36.945.629	3.856.084	-	251.244	70.404	1.226	1.128.323	57.648
KOTA TEGAL	13.987.799	3.472.096	-	251.244	70.404	1.226	1.128.324	58.648

### 3. Pengaruh PDRB terhadap kemiskinan

Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel Produk Domestik Regional Bruto memiliki koefisien sebesar  $-4.44E-09$ , setiap kenaikan 1 persen IPM akan mengurangi jumlah penduduk miskin sebesar  $-4.690615$  persen dan begitu juga sebaliknya. Sehingga dapat disimpulkan, PDRB memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap variabel Jumlah Penduduk Miskin pada kota di Provinsi Jawa Tengah.

Pertumbuhan PDRB yang meningkat setiap tahunnya menunjukkan peningkatan output secara luas, kenaikan PDRB juga diikuti oleh kenaikan faktor-faktor produksi sebagai pembentuknya. Hal ini didukung adanya komponen PDRB karena industri padat modal yang banyak beroperasi, khususnya pada pinggiran kota. Hal ini membuat kenaikan output barang/jasa, namun tidak diimbangi dengan penyerapan tenaga kerja. Akibatnya pendapatan masyarakat rendah dan menurunkan

daya beli. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan nilai PDRB tidak selalu signifikan sektor kemiskinan.

#### **4. Pengaruh TPT terhadap kemiskinan**

Hasil analisis estimasi regresi menghasilkan bahwa variabel Tingkat Pengangguran Terbuka memiliki koefisien sebesar -0.400461, artinya setiap kenaikan 1 persen TPT akan mengurangi jumlah penduduk miskin sebesar 0.400461 persen dan begitu juga sebaliknya. TPT dari hasil penelitian ini juga menghasilkan nilai *prob* sebesar  $0,2576 < \alpha$  sebesar 0,05 artinya TPT berpengaruh signifikan dan negatif.

Secara teknis, ini disebabkan oleh rentang waktu yang digunakan peneliti, dimana hanya dalam rentang lima tahun akan tetapi apabila waktu yang digunakan lebih lama tentunya akan memberikan hasil analisa yang berbeda.

Secara substansi, pernyataan ini menjadikan asumsi bahwa teori tidak selamanya berjalan. Fakta empiris menunjukkan bahwa pada tingkat kota memiliki pertumbuhan ekonomi naik, akan tetapi diikuti juga naiknya tingkat kemiskinan yang ada, banyaknya PHK menyebabkan pengangguran, dimana mereka beralih ke usaha pribadi atau pekerjaan berbasis teknologi, namun datanya tidak terdeteksi dalam BPS. BPS menjelaskan bahwa pengangguran, terbuka terdiri dari: mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan, mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha, mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, dan mereka yang sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Hal tersebut dapat di mungkinkan bahwa terdapat data yang tidak terdeteksi sebagai sebuah pekerjaan seperti: para pekerja seni, makelar tanah, investor saham, jasa marketing online dan lain-lain. Kondisi seperti ini banyak ditemui pada daerah perkotaan.

Hal ini dimungkinkan turut menjadi faktor mengapa tingkat pengangguran terbuka naik dan diikuti kenaikan pada tingkat kemiskinan di tingkat Kota Provinsi Jawa Tengah.

#### **5. Pengaruh UMP terhadap kemiskinan**

Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel Upah Minimum memiliki koefisien sebesar  $1.56E-05$ , dengan asumsi setiap kenaikan 1 juta rupiah UMP akan menaikkan jumlah penduduk miskin sebesar  $1.56E-05$  juta rupiah dan begitu juga

sebaliknya. UMP dari hasil penelitian berpengaruh signifikan dan positif terhadap kemiskinan di tingkat Kota Provinsi Jawa Tengah.

Pada penelitian ini kenaikan upah dikarenakan banyaknya mata pencaharian pada sektor informal. Sehingga, kenaikan upah tidak banyak mengubah taraf hidupnya. Kenaikan upah terjadi karena tingkat produksi naik yang disebabkan oleh inflasi. Dimana kenaikan pendapatan juga diikuti oleh kenaikan harga barang atau jasa. Karenanya pada sebagian masyarakat kenaikan upah digunakan untuk mengganti kenaikan atas harga barang atau jasa yang naik.



## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN IMPLIKASI**

#### **5.1 Simpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, mengacu kepada hasil estimasi dan pembahasan dengan penelitian yang berjudul “Analisis Pengaruh IPM, DBH, PDRB, TPT dan UMP Terhadap Kemiskinan Tingkat Kota Di Provinsi Jawa Tengah tahun 2017-2021”, menghasilkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Indeks pembangunan manusia berpengaruh negatif terhadap jumlah kemiskinan tingkat Kota di Provinsi Jawa Tengah. Hal ini menjelaskan jika peningkatan indeks pembangunan manusia akan mempengaruhi penurunan jumlah kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. Hal ini dimungkinkan suksesnya wajar pendidikan dua belas tahun, harapan hidup yang tinggi, serta kemampuan daya beli terhadap kebutuhan pokok.
2. Dana bagi hasil berpengaruh positif terhadap kemiskinan pada tingkat kota di Provinsi Jawa Tengah. Hal ini menjelaskan bahwa dana bagi hasil berpengaruh terhadap jumlah kemiskinan. Hal ini disebabkan adanya aliran dana kepada sektor-sektor yang dinilai tidak berimplikasi terhadap penurunan kemiskinan. Alokasi terbesar diberikan pada sektor perpajakan yang berorientasi kepada cukai, dan kualitas bahan baku industri sedangkan sektor SDA kehutanan tidak berdampak langsung terhadap menurunkan kemiskinan.
3. Produk domestik regional bruto tidak berpengaruh terhadap jumlah kemiskinan pada tingkat kota di Provinsi Jawa Tengah. Hal tersebut karena komponen PDRB Provinsi Jawa Tengah terdapat sektor industri yang berfokus pada padat modal, dimana tidak banyak menyerap lapangan pekerjaan. Sehingga pertumbuhan ekonomi tidak mampu menurunkan kemiskinan.
4. Tingkat pengangguran terbuka tidak berpengaruh terhadap jumlah kemiskinan pada tingkat kota di Provinsi Jawa Tengah. Hal tersebut dijelaskan, bahwa terdapat pekerjaan yang tidak terdeteksi sebagai pekerjaan menurut BPS. Namun pada kenyataannya kondisi ini dapat menurunkan kemiskinan tetapi dianggap sebagai pengangguran terbuka.

5. Upah minimum berpengaruh positif terhadap jumlah kemiskinan pada tingkat kota di Provinsi Jawa Tengah. Hal tersebut terjadi karena kenaikan upah diimbangi dengan inflasi dan ini membuat harga kebutuhan dasar ikut meningkat, kenaikan upah digunakan untuk membayarkan besaran inflasi pada harga barang dan jasa yang naik.
6. Secara simultan menjelaskan bahwa angka pada variabel IPM, DBH dan UMP memiliki pengaruh terhadap kemiskinan pada tingkat Kota Provinsi Jawa Tengah, sedangkan PDRB dan TPT tidak berpengaruh terhadap kemiskinan.

## **5.2 Implikasi**

1. Indeks pembangunan manusia berdampak dalam penurunan jumlah kemiskinan di Kota Jawa Tengah. Pemerintah melalui program-program dapat mempertahankannya kebijakan yang ada akan tetapi masih diperlukan kebijakan pendukung dalam peningkatan pembangunan manusia serta lebih variatif agar sesuai dengan kebutuhan industri yang ada, sehingga akan menaikkan perekonomian.
2. Adanya tinjauan kembali terhadap kebijakan dana transfer yang lebih transparan agar penggunaannya dapat diketahui oleh masyarakat. Daerah yang tidak memiliki potensi sumber daya alam agar lebih fokus pada pelatihan ekonomi kreatif dan industri skala besar sehingga dapat menyerap tenaga kerja serta kesejahteraan masyarakat tidak bersumber dari potensi geografis saja.
3. Kenaikan produksi dalam ekonomi, diharapkan diikuti kenaikan pada sektor pendapatan di masyarakat dan dapat memenuhi kebutuhan agar tercapai kesejahteraan masyarakat. Seperti memperbanyak industri padat modal dan padat karya karena berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.
4. Mengkaji ulang kategori jenis-jenis pekerjaan, dengan adanya adaptasi baru setelah pemulihan akibat pandemi covid-19. Agar pekerja dapat terdeteksi dan hasilnya menjadi bahan pertimbangan dalam pembuatan kebijakan masa mendatang.
5. Pemangku kebijakan agar mengontrol besaran inflasi dan penawaran permintaan barang, agar besaran upah yang naik dapat memperbaiki taraf hidup lebih baik.

Karenanya upah memiliki pengaruh terhadap kemiskinan, peningkatan upah akan memperbaiki kondisi kesejahteraan masyarakat secara umum.



## Daftar pustaka

- Aktivitas Pasar Modal Indonesia Di Era Pandemi*. (n.d).  
<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpkn-kupang/baca-artikel/13817/Aktivitas-Pasar-Modal-Indonesia-Di-Era-Pandemi.html>
- Badan Pusat Statistik. (n.d.-a). *Angka Inflasi Jawa Tengah 2017-2021*,  
<https://www.bps.go.id/subject/3/inflasi.html>
- Badan Pusat Statistik. (n.d.-b). *Angka kemiskinan pada Kota di Provinsi Jawa Tengah*,  
<https://sulut.bps.go.id/subject/23/kemiskinan.html#subjekViewTab1>
- Badan Pusat Statistik. (2021). *Statistik Profil Kemiskinan di Indonesia. Profil Kemiskinan Di Indonesia Maret, 07(56)*, 1–12.
- Berliani, K. (2021). Pengaruh Tingkat Pengangguran, Tingkat Pendidikan dan Laju Pertumbuhan Penduduk Terhadap Tingkat Kemiskinan Penduduk Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2020. *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 6(2), 872.  
<https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i2.2244>
- Diyah, S. ', & Adawiyah, E. (2020). Kemiskinan Dan Fakor-Faktor Penyebabnya. *Journal of Social Work and Social Service*, 1(1), 2721–6918.
- E. Nur Amaliah, Darnah, S. (2020). Regresi Data Panel dengan Pendekatan Common Effect Model ( CEM ), Fixed Effect model ( FEM ) dan Random Effect Model ( REM ). 1(2), 106–115.
- Ekonomi, J. I., Pembangunan, S., Ekonomika, F., & Bisnis, D. (2013). Analisis PDRB, Inflasi, Upah Minimum Provinsi, dan Angka Melek Huruf Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Jawa Tengah Tahun 1990-2011 Muhammad Shun Hajji, Nugroho SBM. *Diponegoro Journal of Economics*, 2(3), 1–10. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/economics>
- Gumelar, A. (2021). *Analisis Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Tingkat Kemiskinan ( Studi Kasus : Kabupaten / Kota di Sulawesi Tengah Jurnal Ekonomi-QU*. 11(2), 342–364.
- Intan, A. W. (2022). *Analisis Pengaruh AHH, IPM, PDRB, dan UMK Terhadap Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Tengah 2011-2020*. 70.
- Kevin, K., Putri, A. K., & Nasrun, A. (2020). Pengaruh inflasi dan laju pertumbuhan penduduk terhadap kemiskinan di Sumatera Bagian Selatan tahun 2011-2018. *Sorot*, 15(1), 33. <https://doi.org/10.31258/sorot.15.1.33-42>
- Nurmainah, S. (2013). Analisis Pengaruh Belanja Modal Pemerintah Daerah, Tenaga Kerja Terserap dan Indeks Pembangunan Manuis Terhadap Pertumbuhan. *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi (JBE)*, 20(2), 131–141.  
<https://www.unisbank.ac.id/ojs/index.php/fe3/article/download/3158/847>



- Permana, A. Y., & Arianti, F. (2012). Analisis Pengaruh PDRB, Pengangguran, Pendidikan, dan Kesehatan Terhadap Kemiskinan Di Jawa Tengah Tahun 2004-2009. *Diponegoro Journal Of Economics*, 1(1), 2. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jme/article/view/128>
- Prasetyoningrum, A. K., & Sukmawati, U. S. (2018). Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Tenaga Kerja dan Kemiskinan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. *Equilibrium*, 6(2), 217–240. <http://eprints.ums.ac.id/80956/>
- Pratomo, A. A. (2015). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil dan Belanja Daerah Terhadap Tingkat Kemiskinan DKI Jakarta*.
- Rahmat, D., & Bachtiar, N. (2018). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia Di Sumatera Barat. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1–16.
- Saputra, W. A. (2018). Tingkat Kemiskinan. *Ekonomi Dan Bisnis*, 1–77. <http://eprints.undip.ac.id/28982/1/Skripsi018.pdf>
- Setya Ningrum, S. (2017). Analisis Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka, Indeks Pembangunan Manusia, Dan Upah Minimum Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Indonesia Tahun 2011-2015. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 15(2), 184–192.
- Sukirno, S. (2012). *Sadono Sukirno, MAkro Ekonomi , Edisi Ketiga. intro (PDFDrive ).pdf*.
- van/indrawiguna. (2013). Dampak Pengangguran Terhadap Kemiskinan. *Jurnal Online Universitas Jambi*.
- Wahyudi, D., & Rejekingsih, T. W. (2013). Analisis Kemiskinan di Jawa Tengah. In *Diponegoro Journal of Economics* (Vol. 2, Issue 1).
- Widodo, A., Waridin, W., & Kodoatie, J. M. (2012). Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Di Sektor Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Pengentasan Kemiskinan Melalui Peningkatan Pembangunan Manusia Di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, 1(1), 25. <https://doi.org/10.14710/jdep.1.1.25-42>

## LAMPIRAN

### Lampiran 1. Data Penelitian

Kota	Tahun	PM	IPM	PDRB	DBH	AHH	UMP	TPT
Kota Magelang	2017	10.6	77.84	5820532	30.79	76.66	1453000	6.68
Kota Magelang	2018	9.6	78.31	6138622.75	24.42	76.72	1580000	4.78
Kota Magelang	2019	9.1	78.8	6470539.51	19.98	76.75	1707000	4.37
Kota Magelang	2020	9.27	78.99	6312054.41	28.52	76.85	1853000	8.59
Kota Magelang	2021	9.44	79.43	6513894.68	35.03	76.93	1914000	8.73
Kota Surakarta	2017	54.9	80.85	31685480.46	67.19	77.06	1534985	4.47
Kota Surakarta	2018	47	81.46	33505900.66	47.51	77.11	1668700	4.35
Kota Surakarta	2019	45.2	81.86	35441107.67	33.44	77.12	1802700	4.16
Kota Surakarta	2020	47.03	82.21	34815965.32	60.58	77.22	1956200	7.92
Kota Surakarta	2021	48.78	82.62	36211248.26	69.57	77.32	2013810	7.85

Kota Salatiga	2017	9.6	81.62	8624240.98	30.29	76.98	1596845	3.96
Kota Salatiga	2018	9.2	82.41	9127857.77	24.42	77.11	1735930	4.23
Kota Salatiga	2019	9.2	83.12	9666446.31	19.81	77.22	1875325	4.33
Kota Salatiga	2020	9.69	83.14	9503711.49	26.81	77.4	2034915	7.44
Kota Salatiga	2021	10.14	83.6	9820286.85	35.44	77.55	2101457	7.26
Kota Semarang	2017	80.9	82.01	123279891.9	208.88	77.21	2125000	6.61
Kota Semarang	2018	73.6	82.72	131266362.6	168.78	77.23	2310088	5.21
Kota Semarang	2019	72	83.19	140199517.4	132.61	77.25	2498588	4.5
Kota Semarang	2020	79.58	83.05	137609712.2	163.77	77.34	2715000	9.57
Kota Semarang	2021	84.45	83.55	144710662.9	222.12	77.51	2810025	9.54
Kota Pekalongan	2017	22.5	73.77	6706278.7	33.13	74.19	1623750	5.05
Kota Pekalongan	2018	20.5	74.24	7087915.58	26.69	74.25	1765179	6.08

Kota Pekalongan	2019	20.2	74.77	7477425.04	20.56	74.28	1906922	5.8
Kota Pekalongan	2020	22.16	74.98	7337833.89	29.21	74.38	2072000	7.02
Kota Pekalongan	2021	23.49	75.4	7601486.23	35.49	74.44	2139754	6.89
Kota Tegal	2017	20.1	73.77	10006943	36.54	74.23	1499500	8.19
Kota Tegal	2018	19.4	74.44	10594340.17	25.57	74.3	1630500	7.81
Kota Tegal	2019	18.6	74.93	11205782.88	19.91	74.34	1762000	8.08
Kota Tegal	2020	19.55	75.07	10949122.06	30.15	74.46	1925000	8.4
Kota Tegal	2021	20.27	75.52	11290268.87	37.37	74.54	1982750	8.25

Sumber : Olahan Badan Pusat Statistik 2017-2021

## OUTPUT E-VIEWS

### Lampiran 2. Common Effect Model

Dependent Variable: JK				
Method: Panel Least Squares				
Date: 11/12/22 Time: 11:31				
Sample: 2017 2021				
Periods included: 5				
Cross-sections included: 6				
Total panel (balanced) observations: 30				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	48.78616	51.03962	0.955849	0.3487

IPM	-0.225849	0.646838	-0.349159	0.7300
DBH	0.112373	0.123691	0.908491	0.3727
PDRB	4.32E-07	1.70E-07	2.538252	0.0180
TPT	0.011000	1.409353	0.007805	0.9938
UMP	-1.09E-05	1.09E-05	-0.997452	0.3285
R-squared	0.873502	Mean dependent var	31.20167	
Adjusted R-squared	0.847148	S.D. dependent var	25.24290	
S.E. of regression	9.869039	Akaike info criterion	7.593538	
Sum squared resid	2337.550	Schwarz criterion	7.873778	
Log likelihood	-107.9031	Hannan-Quinn criter.	7.683189	
F-statistic	33.14519	Durbin-Watson stat	0.074747	
Prob(F-statistic)	0.000000			

### Lampiran 3. Fixed Effect Model

Dependent Variable: JK				
Method: Panel Least Squares				
Date: 11/12/22 Time: 11:29				
Sample: 2017 2021				
Periods included: 5				
Cross-sections included: 6				
Total panel (balanced) observations: 30				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	368.0472	126.3417	2.913110	0.0089
IPM	-4.690615	1.709475	-2.743892	0.0129
DBH	0.132703	0.022498	5.898377	0.0000
PDRB	-4.44E-09	1.24E-07	-0.035746	0.9719
TPT	-0.400461	0.343151	-1.167013	0.2576
UMP	1.56E-05	6.76E-06	2.308953	0.0324

Effects Specification			
Cross-section fixed (dummy variables)			
R-squared	0.997794	Mean dependent var	31.20167
Adjusted R-squared	0.996633	S.D. dependent var	25.24290
S.E. of regression	1.464703	Akaike info criterion	3.877757
Sum squared resid	40.76174	Schwarz criterion	4.391529
Log likelihood	-47.16635	Hannan-Quinn criter.	4.042117
F-statistic	859.4452	Durbin-Watson stat	1.829219
Prob(F-statistic)	0.000000		

#### Lampiran 4. Random Effect Model

Dependent Variable: JK				
Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)				
Date: 11/12/22 Time: 11:30				
Sample: 2017 2021				
Periods included: 5				
Cross-sections included: 6				
Total panel (balanced) observations: 30				
Swamy and Arora estimator of component variances				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	48.78616	7.574991	6.440425	0.0000
IPM	-0.225849	0.096000	-2.352601	0.0272
DBH	0.112373	0.018358	6.121333	0.0000
PDRB	4.32E-07	2.52E-08	17.10252	0.0000
TPT	0.011000	0.209168	0.052589	0.9585
UMP	-1.09E-05	1.62E-06	-6.720741	0.0000
Effects Specification				

		S.D.	Rho
Cross-section random		4.93E-05	0.0000
Idiosyncratic random		1.464703	1.0000
Weighted Statistics			
R-squared	0.873502	Mean dependent var	31.20167
Adjusted R-squared	0.847148	S.D. dependent var	25.24290
S.E. of regression	9.869039	Sum squared resid	2337.550
F-statistic	33.14519	Durbin-Watson stat	0.074747
Prob(F-statistic)	0.000000		
Unweighted Statistics			
R-squared	0.873502	Mean dependent var	31.20167
Sum squared resid	2337.550	Durbin-Watson stat	0.074747

#### Lampiran 5. Chow Test

Redundant Fixed Effects Tests			
Equation: FIXED			
Test cross-section fixed effects			
Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	214.117339	(5,19)	0.0000
Cross-section Chi-square	121.473442	5	0.0000
Cross-section fixed effects test equation:			
Dependent Variable: JK			
Method: Panel Least Squares			
Date: 11/29/22 Time: 16:47			
Sample: 2017 2021			

Periods included: 5				
Cross-sections included: 6				
Total panel (balanced) observations: 30				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	48.78616	51.03962	0.955849	0.3487
IPM	-0.225849	0.646838	-0.349159	0.7300
DBH	0.112373	0.123691	0.908491	0.3727
PDRB	4.32E-07	1.70E-07	2.538252	0.0180
TPT	0.011000	1.409353	0.007805	0.9938
UMP	-1.09E-05	1.09E-05	-0.997452	0.3285
R-squared	0.873502	Mean dependent var		31.20167
Adjusted R-squared	0.847148	S.D. dependent var		25.24290
S.E. of regression	9.869039	Akaike info criterion		7.593538
Sum squared resid	2337.550	Schwarz criterion		7.873778
Log likelihood	-107.9031	Hannan-Quinn criter.		7.683189
F-statistic	33.14519	Durbin-Watson stat		0.074747
Prob(F-statistic)	0.000000			

**Lampiran 6.** Hausman Test

Redundant Fixed Effects Tests			
Equation: FIXED			
Test cross-section fixed effects			
Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	214.117339	(5,19)	0.0000
Cross-section Chi-square	121.473442	5	0.0000



Cross-section fixed effects test equation:

Dependent Variable: JK

Method: Panel Least Squares

Date: 11/29/22 Time: 16:47

Sample: 2017 2021

Periods included: 5

Cross-sections included: 6

Total panel (balanced) observations: 30

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	48.78616	51.03962	0.955849	0.3487
IPM	-0.225849	0.646838	-0.349159	0.7300
DBH	0.112373	0.123691	0.908491	0.3727
PDRB	4.32E-07	1.70E-07	2.538252	0.0180
TPT	0.011000	1.409353	0.007805	0.9938
UMP	-1.09E-05	1.09E-05	-0.997452	0.3285
R-squared	0.873502	Mean dependent var		31.20167
Adjusted R-squared	0.847148	S.D. dependent var		25.24290
S.E. of regression	9.869039	Akaike info criterion		7.593538
Sum squared resid	2337.550	Schwarz criterion		7.873778
Log likelihood	-107.9031	Hannan-Quinn criter.		7.683189
F-statistic	33.14519	Durbin-Watson stat		0.074747
Prob(F-statistic)	0.000000			

**BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR /SKRIPSI**

**SKRIPSI BERJUDUL**

**ANALISIS PENGARUH INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA, DANA BAGI HASIL,  
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO, TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA  
DAN UPAH MINIMUM TERHADAP JUMLAH KEMISKINAN TINGKAT KOTA DI  
PROVINSI JAWA TENGAH PADA TAHUN 2017 - 2021**

Disusun Oleh : **BAYU WASKITO UTOMO**

Nomor Mahasiswa : **19313246**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan **LULUS**

Pada hari, tanggal: **Kamis, 12 Januari 2023**

Penguji/ Pembimbing Skripsi : **Unggul Priyadi,Dr.,M.Si.**

Penguji : **Jaka Sriyana,Prof.,S.E.,M.Si., Ph.D.**



Mengetahui  
Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika  
Universitas Islam Indonesia



**Johan Arifin, SE., M.Si.,Ph.D.,CFrA.**